PENERAPAN SISTEM E-PLANNING DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

ADELIA MAYANGGITA
NIM. D02421005

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo**.adalah karya saya di bawah arahan dari komisi pembimbing. Skripsi ini belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun dan bebas dari unsur plagiat. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etikan penulisan buku pedoman penulisan skripsi/karya ilmiah Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiat pada Skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi hukum dan akademik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 12 Juni 2025



ADELIA MAYANGGITA
NIM. D02421005

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Penelitian :Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Nama : Adelia Mayanggita

N I M : D02421005

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Pembimbing

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Apris Ara Tilome,S.Ag, M.SI	Dr.Franky Djafar, SPd, M.SI
NIDN. 0916017402	NIDN. 0928088802

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Ketua Program Studi Administrasi Publik
Dr. Apris Ara Tilome,S.Ag, M.SI	Dr. Rifka S. Akibu. M.Si
NIDN. 0916017402	NIDN: 0909019001

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Penelitian :Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Nama : Adelia Mayanggita

N I M : D02421005

Program Studi : Administrasi Publik

KOMISI PENGUJI

1. Dian Fitriani Karim, S.S,. M.Si (.....)
2. Dr. Apris Ara Tilome ,S.Ag, M.SI .....)
3. Dr.Franky Djafar, SPd, M.SI (.....)

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Apris Ara Tilome ,S.Ag, M.SI
NIDN. 0916017402

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Dr. Rifka S. Akibu. M.Si
NIDN: 0909019001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah,Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al Insyirah:5-6)

"Terlambat bukan berarti gagal,cepat bukan berati hebabt. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah,setiap orang memilki proses yang berbeda.percaya proses itu yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit."

(Edwar Satria)

"Tetap tenang,tebarkan senyuman,dan yakinlah semua orang punya prosesnya."

Yaa Robb, puja dan puji kupersembahkan hanya untuk-Mu. Seraya bersyukur atas apa yang diberikan untuk diri ini, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan berupa akal, rizki, ilmu yang bermanfaat dan kesabaran untuk bangkit dari setiap cobaan.

Kepersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang tercinta:

1. Cinta pertama dan panutan saya,Alm. papa Siswoto dan pintu surgaku Mama Framila Susanti.Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan.Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Al-fatihah untuk papaku tercinta semoga Allah SWT menempatkan papa ditempat terbaik disisinya dan teruntuk mama semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT panjang umur dan bahagia selalu.
2. Teruntuk Nenek tercinta yang sudah menjadi sosok ibu dalam hidup saya.Terima kasih karena telah merawat,membimbing,dan mencintai saya tanpa batas.semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT panjang umur dan bahagia selalu.
3. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik UMGo angkatan 2021, teman-teman P3NUMPANG terima kasih atas kebersamaan selama 8 semester ini,Dan paling penting bagi saya seseorang pemilik Nim D02421028 ,D02421011 dan A01421011yang selalu ada dan memberikan dorongan untuk terus melangkah dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa, Terima kasih atas segalanya.
4. Bapak Dr, Apris Ara Tilome, S, Ag, M. Si sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. Franky Djafar , S.Pd, M.Si sebagai pembimbing 2 Terima kasih

telah memberikanwaktunya untuk membimbing saya dan memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

5. Ibu Dian Fitriani Karim, S.S,. M.Si sebagai penguji saya yang telah memberikan saran arahan dan kriitik yang membangundemi kesempurnaan skripsi ini.

6. untuk diri sendiri,Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna,terima kasih sudah memilih untuk bertahan,mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini,serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu.Dengan adanya skripsi ini,telah membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.AP.menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya.bagaimanapun kehidupan selanjutnya ,hargai dirimu,rayakan dirimu,berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

7. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz untukku*. Terima kasihsudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah dibumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia di lahirkan untuk saya,kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

ALMAMATERKU TERCINTA TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "(Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.)" ini dengan tepat sesuai waktu yang ditentukan. Proposal Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat lulus untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa usaha yang dilakukan untuk membuat Proposal Penelitian ini dapat terlaksana atas izin Allah swt, peneliti berharap semoga hasilnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya sebagai peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M,Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
2. Dr. Muh. Firyal Akbar S.IP M.Si Wakil Rektor 1 Dalam Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
3. Dr. Sahaludin Pakaya, M. H Selaku Wakil Rektor II Dalam Bidang Administrasi Umum Keuangan, perencanaan dan sumber Universitas Muhammdiyah Gorontalo;
4. Dr. Thambrin Koem, M.Pd Selaku Wakil Rektor III Dalam Bidang Kemahasiswaan, Al-Islam Kemuhammadiyaan dan kerja sama Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
5. Dr. Apris A. Tilome, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
6. Dr. Rifka S. Akibu, S.Pd., M.Si Selaku Ketua Progran Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
7. Dr. Apris A. Tilome S.Ag., M.Si Selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

8.Dr. Franky Djafar S.Pd.M.Si selaku pembimbing akademik dan juga pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis

9.Seluruh Dosen dan Civitas Akademik program Studi Administrasi publik yang telah memberikan ilmu;

10.Kedua orang tua , ayah dan ibu yang telah mengasuh dan selalu memberikan dukungan penuh serta doa-doa untuk keberhasilan saya.

11.Seluruh Staf pegawai Administrasi dilingkungan Fakultas ilmusocial khususnya pada program studi Administrasi Publik Univetrsitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah banyak membantu segala hal dalam penyelesaian studi;

12.Untuk diri sendiri yang selalu kuat dan tidak putus semangat sampai saat selesai.

13.Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesain usulan penelitian

Gorontalo,26juni2025

Penulis

Adelia Mayanggita

Abstract

This study aims to determine the level of competency of educators in the use of information technology (IT) at SMP Negeri 8 Satu Atap (SATAP) Telaga Biru. Competence in IT mastery is an important indicator in supporting the effectiveness of the learning process in the digital era. This study used a descriptive approach with qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation with teachers and other educational staff at the school. The results indicate that most educators have a basic understanding of information technology use, such as computer operation, office applications, and utilizing the internet as a learning resource. However, there are still limitations in optimally using IT for learning activities, particularly in integrating technology with teaching methods. Factors influencing IT competency include education level, age, training received, and the availability of technology facilities at the school. Therefore, improving competency through ongoing training and providing supporting resources is essential to foster digital transformation in the educational environment.

Keywords: *Competence, Educators, Information Technology, SATAP Junior High Schools, Education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi pegawai tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi informasi (IT) di SMP Negeri 8 Satu Atap (SATAP) Telaga Biru. Kompetensi dalam penguasaan IT menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung efektivitas proses pembelajaran di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap guru dan staf pendidik di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik memiliki pemahaman dasar mengenai penggunaan teknologi informasi, seperti pengoperasian komputer, penggunaan aplikasi perkantoran, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan IT secara optimal untuk kegiatan pembelajaran, terutama dalam integrasi teknologi dengan metode mengajar. Faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi IT meliputi tingkat pendidikan, usia, pelatihan yang diikuti, serta ketersediaan fasilitas teknologi di sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan sarana pendukung sangat diperlukan untuk mendorong transformasi digital di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: Kompetensi, Tenaga Pendidik, Teknologi Informasi, SMP SATAP, Pendidikan

DAFTAR ISI

Contents

PENGESAHAN PEMBIMBING ii
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
BAB II 6
KAJIAN TEORI 6
2.1. Administrasi Publik 6
2.2. Manajemen Publik 7
2.3. Penerapan 8
2.4. Elektronik Governance 12
2.5. Sistem E-Planning 17
2.6. Perencanaan 19
2.7. Perencanaan Pembangunan 20
2.8. TOE (Technology Organization Enviroment Framework) 22
2.9 Penelitian Yang Relevan 23
2.10 Kerangka Pikir 26
BAB III 27
METODEOLOGI PENELITIAN 27
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 27
3.2. Kehadiran Peneliti 27
3.3. Lokasi Penelitian 27
3.4. Sumber Data 28
3.5. Prosedur Pengumpulan Data 28
3.6. Analisis Data 29
3.8. Tahap-tahap Penelitian 31
BAB IV 33

HASIL DAN PEMBAHASAN 33
Gambar 3 Struktur Organisasi Bappeda 36
4.2. Hasil Wawancara 36
4.3 Pembahasan 44
BAB V 48
PENUTUP 48
DAFTAR PUSTAKA 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 kajian penelitian relevan.....16
Tabel 2.daftar informan.....56
Tabel 3.matrix hasil wawancara.....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 kerangka berpikir.....18

Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif ..39

Gambar 3 Struktur Organisasi Bappeda……46

Gambar 4 standar Operasional Prosedur……35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Daftar Riwayat Hidup 52
Lampiran 2. Pedoman Wawancara 53
Lampiran 3.Daftar Informan Penelitian 55
Lampiran 4.Matrix Hasil Wawancara 56
Lampiran 6.Surat Permohonan Izin Penelitian 66
Lampiran 7. Rekomendasi Kesbangpol 67
Lampiran 8,Surat Keterangan Telah Meneliti 68
Lampiran 9.Dokumentasi Kegiatan Penelitian 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan pembangunan wilayah adalah usaha yang terstruktur untuk mengarahkan pengembangan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung tujuan ini, pemerintah Indonesia telah memulai berbagai reformasi, salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi informasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang disebut e-Planning. E-Planning adalah sebuah inovasi yang berbasis teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam zaman globalisasi sekarang, perekembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor.situasi ini menciptakan peluang besar bagi indonesia secara keseluruham,serta bagi instansi pe,erintah atau OPD secara spesifik,untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi serta internet dalam struktur pemerintahan.dengan demikian, untuk mencapai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengaturan sistem manajemen dan proses kerja dalam lingkungan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Teknologi memiliki peran signifikan sebagai instrumen paling penting dalam memperbaiki mutu pelayanan yang bersih,transparan,efisien,dan efeltif demi mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik.ini adlah harapan bagi setiap warga untuk menerima pelayanan yang memuaskan dari pihak pemerintah.saat ini,pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kemajuab teknologi agar tidak ketinggalan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang kian beragam.

Perkembangan teknologi saat ini mendukung BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk berinovasi dengan menciptakan sistem informasi terpadu dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Salah satu inovasi dari sistem ini

adalah aplikasi E-Planning, yang mempermudah proses perencanaan pembangunan di semua level secara administratif. E-Planning kini menjadi salah satu bentuk penerapan e-government, namun lebih fokus pada penggunaan teknologi elektronik dalam bidang perencanaan dan pembangunan. Ini adalah langkah logis dalam mengembangkan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

Sistem e-Planning adalah suatu platform informasi yang menggabungkan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah ke dalam bentuk digital yang saling terhubung. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Tahapan, Prosedur Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Sistem e-Planning adalah suatu platform informasi yang menggabungkan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah ke dalam bentuk digital yang saling terhubung. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Langkah-Langkah, Proses Penyusunan, Pengawasan, serta Penilaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Salah satu daerah yang telah mengadopsi e-Planning dalam kegiatan perencanaannya adalah Kabupaten Gorontalo. Sebagai sebuah daerah otonom di Provinsi Gorontalo, kabupaten ini telah menerapkan sistem e-Planning dalam upaya perencanaan pembangunan. Langkah ini merupakan bagian dari usaha pemerintah daerah untuk memperbarui sistem perencanaan pembangunan dan meningkatkan mutu perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Undang-Undang (UU) serta peraturan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencakup UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan monitoring pembangunan, serta UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berisi tentang manajemen keuangan ditingkat daerah dan alokasi dana antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), peraturan ini mengelola data dan informasi terkait pemerintahan daerah, sedangkan Permendagri No. 98 Tahun 2018 yang mengatur Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD), berfokus pada pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Namun, peraturan tersebut telah dicabut oleh Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo, sebagai sektor terdepan dalam perencanaan pembangunan daerah, memainkan peran penting dalam mengimplementasikan sistem e-Planning. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat tergantung pada kemampuan BAPPEDA dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaannya. Dengan adanya aplikasi e-Planning dalam proses perencanaan, diharapkan dapat mempermudah tugas para perencana, mengingat bahwa proses perencanaan memerlukan waktu yang lama dan ketelitian tinggi dalam penyusunannya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, implementasi sistem e-Planning di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan beberapa tahun ini namun masih banyak permasalahan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Tidak semua aparatur memiliki pemahaman dan keterampilan dalam Penggunaan teknologi informasi, terutama dalam aspek e-planning, akan memengaruhi cara penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan daerah. Secara otomatis, hal ini akan menghadirkan tantangan serius dalam sektor perencanaan pembangunan. Di sisi lain, masalah muncul karena para aparatur mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen rencana akibat keterbatasan pengetahuan mengenai standar operasional prosedur perencanaan yang berlaku, serta adanya gangguan pada koneksi internet yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program e-planning, sehingga para aparatur kesulitan untuk menganalisis capaian kinerja, baik antar waktu, antar wilayah, maupun dalam hal kecocokan dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas data dan informasi yang dihasilkan.

Aspek regulasi dan kebijakan juga memainkan peran penting dalam implementasi e-Planning. Keberlanjutan sistem e-Planning juga perlu mendapat perhatian khusus. Sistem ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Sistem pemeliharaan dan pengembangan kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Analisis mendalam terhadap penerapan e-Planning di Kabupaten Gorontalo menjadi penting untuk dilakukan mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam perspektif Islam, konsep perencanaan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut mengandung prinsip dasar tentang pentingnya perencanaan masa depan yang sistematis dan terukur. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sistem e-Planning hadir sebagai perwujudan modern dari prinsip perencanaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana setiap langkah pembangunan harus direncanakan dengan matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga berkaitan dengan permintaan untuk meningkatkan mutu layanan publik serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Penerapan e-Planning merupakan salah satu inovasi yang dapat membantu mencapai sasaran tersebut dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada studi berjudul “Penerapan Sistem E-Planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo. ”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Adanya gangguan fasilitas jaringan internet yang tidak stabil berdampak pada pengoprasian program e-planning
2. Belum kuatnyaStandard Operating Procedure(sop) untuk dijadikan acuan
3. Kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam penggunaan

teknologi informasi terutama berhubungan dengan penerapan e-planning.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Penerapan Sistem E-Planning Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana penerapan sistem e-Planning mendukung proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap kajian implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

2 Praktis

Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem e-Planning di Kabupaten Gorontalo.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1. Administrasi Publik

Istilah administrasi publik adalah terjemahan dari "public administration" dalam bahasa Inggris, yang sering disebut sebagai administrasi negara atau pemerintahan, menurut Indradi (2016:110). Indradi (2016:114) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta tenaga kerja publik untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Barton dan Chapel, menurut Indradi (2016:116), menggambarkan administrasi publik sebagai "aktivitas pemerintah. " Starling, yang juga dirujuk oleh Indradi (2016:116), menambahkan bahwa administrasi publik meliputi semua tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan yang telah dijanjikan saat kampanye pemilu. Rosenbloom, menurut penjelasan Indradi (2016:116), mendeskripsikan administrasi publik sebagai penerapan elemen manajerial, hukum, dan politik. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teori serta pendekatan manajerial, politik, dan hukum untuk melaksanakan mandat pemerintah di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan tujuan menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kolaborasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Ruang lingkup administrasi publik secara implisit sangat terkait dengan sistem pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Syafi'i (2016:27). Ia menjelaskan bahwa lingkup ini mencakup berbagai aspek, termasuk administrasi pemerintah pusat, daerah, kecamatan, kelurahan, desa, kota madya, dan kota, serta administrasi departemen dan hal-hal yang tidak terkait dengan departemen. Dalam konteks kekuasaan, banyak dibahas oleh para ahli ilmu politik, termasuk administrasi politik domestik, administrasi partai politik, posisi organisasi masyarakat sipil, serta kebijakan pemerintah dan peran pemerintah. Lingkup administrasi publik sangat kompleks dan dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Pasolong (2018:21), terdapat delapan area yang termasuk dalam administrasi publik, yaitu "kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik". Di sisi lain, Henry yang dirujuk oleh Pasolong (2018:19) menguraikan bahwa cakupan administrasi publik mencakup:

a) Organisasi publik, yang pada dasarnya berkaitan dengan model-model organisasi serta perilaku dalam birokrasi
b) Manajemen publik, yang mencakup sistem dan prinsip manajemen, evaluasi program serta produktivitas, anggaran publik, dan pengelolaan sumber daya manusia
c) Implementasi, yang meliputi pendekatan dalam kebijakan publik beserta pelaksanaannya, privatisasi, administrasi antar lembaga pemerintah, serta etika dalam birokrasi.

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa area administrasi publik meliputi lembaga publik, kebijakan publik, birokrasi pemerintahan, pengelolaan publik, kepemimpinan, layanan publik, pengelolaan sumber daya manusia pemerintah, kinerja, dan etika dalam administrasi publik. Ruang lingkup administrasi publik juga terhubung dengan aspek-aspek yang ada dalam interaksi, peristiwa, dan fenomena pemerintahan serta kekuasaan.

2.2. Manajemen Publik

Definisi manajemen publik menurut para ilmuwan yang akan diuraikan berikut ini terpengaruh oleh pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dipilih oleh masing-masing pakar.. Berikut adalah beberapa definisi manajemen publik: Menurut Nor Ghofur (2014), manajemen publik dipahami sebagai pengelolaan pemerintah, yang berarti bahwa manajemen publik juga bertujuan untuk menyusun rencana, mengorganisasi, dan mengawasi layanan kepada masyarakat. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) didefinisikan sebagai usaha individu untuk bertanggung jawab dalam mengelola suatu organisasi, serta memanfaatkan sumber daya (manusia dan peralatan) untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Overman dalam Keban (2008:85), ia menyatakan bahwa manajemen publik tidak dapat disamakan dengan "manajemen ilmiah", meskipun terdapat pengaruh yang signifikan dari "manajemen ilmiah". Manajemen publik bukanlah analisis kebijakan, juga bukan administrasi publik, dan mencerminkan

adanya tekanan dari berbagai orientasi politik dalam kebijakan tersebut. Manajemen publik merupakan sebuah kajian lintas disiplin yang mempelajari berbagai aspek umum dari organisasi, yang mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, informasi, dan aspek politik di sisi lainnya.

Dari pemahaman di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen publik berkaitan dengan metode atau cara untuk menjalankan kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien guna memenuhi tuntutan masyarakat, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen publik adalah proses yang bertujuan untuk menggerakkan sumber daya manusia serta menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebijakan publik.

2.3. Penerapan

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli, pelaksanaan adalah langkah untuk menerapkan konsep, cara, dan berbagai unsur lainnya guna mencapai sasaran tertentu yang sesuai dengan kepentingan kelompok yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.

Menurut Lukman Ali (2007:103), penerapan berarti mempraktikkan, menyesuaikan, atau melaksanakan sesuatu.

Implementasi atau penerapan merupakan sebuah tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat dengan seksama dan terperinci. Umumnya, implementasi dilakukan setelah rencana dianggap sudah final.. Diskusi tentang konsep implementasi semakin banyak seiring meningkatnya kontribusi pemikiran dari berbagai ahli.

Usman (2012:70) menyatakan bahwa penerapan (implementasi) berkaitan dengan aktivitas, tindakan, atau adanya mekanisme dalam suatu implementasi yang bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pendapat Guntur Setiawan (2005:39), Penerapan merupakan perpanjangan dari kegiatan yang saling berhubungan, menyesuaikan proses interaksi antara apa yang ingin dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya, serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien..

Purwanto dan Sulistyastuti (1991:90) menjelaskan bahwa implementasi

adalah proses pengiriman hasil kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada pihak yang dituju sebagai usaha untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Dari definisi yang telah disebutkan, kita dapat melihat bahwa istilah penerapan atau implementasi mengacu kepada mekanisme dalam suatu sistem. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang terorganisir, bukan sekadar kegiatan belaka, dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu demi mencapai target yang diinginkan.

2. 4. Good Governance

Menurut Mardiasmo (2018:23), tata kelola yang baik merupakan penerapan manajemen dalam pembangunan yang kuat dan akuntabel, sesuai dengan prinsip -prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Hal ini mencakup pencegahan kesalahan dalam distribusi dan investasi serta mencegah terjadinya praktik korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu, penerapan disiplin anggaran bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum dan politik yang mendukung perkembangan berbagai aktivitas di bidang bisnis. Di sisi lain, Leny Nofianti (2015:52) menyatakan bahwa tata kelola yang baik berarti pemerintahan yang efisien dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab kepada masyarakat dengan cara yang profesional, transparan, adil, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan langkah-langkah seperti pemberantasan KKN dan peningkatan kinerja pemerintah. Selanjutnya, Rizal Djalil (2018:395) juga mengungkapkan bahwa tata kelola yang baik didefinisikan sebagai manajemen pemerintahan yang baik serta administrasi yang bersih dalam suatu organisasi yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang jelas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada serta mampu menanggulangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Mustafa (2019:187), Good governance adalah pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari penempatan dana investasi yang salah, dan mencegah korupsi. Baik dalam hal politik maupun administratif, ini melibatkan pelaksanaan disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan politik untuk mendukung perkembangan aktivitas bisnis.

Istilah governance tidak hanya mencakup kepemimpinan sebagai suatu aktivitas, tetapi juga melibatkan pengelolaan, pengaturan, bimbingan dalam pelaksanaan, dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan..

2.4. Elektronik Governance

E-Government adalah singkatan dari Pemerintahan Elektronik. E-Government merupakan salah satu tipe atau model sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuatan teknologi digital, di mana segala aktivitas administratif, pelayanan masyarakat, serta pengawasan dan pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk keuangan, pajak, retribusi, dan pegawai, diorganisir dalam satu sistem. E-Government adalah inovasi terkini untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memberikan layanan yang lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan efisien.

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan maksud otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Renaldy Jimmy Kalesaran et al. , 2023). Menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah kebebasan atau hak untuk mengambil keputusan politik dan administratif yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Jeane Mantiri dan Cynthia Maria Siwi, 2018). Sesuai dengan mandat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk menyelesaikan tiga masalah pokokdalam sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, otonomi daerah diharapkan dapat membantu mendekatkan pemerintah dengan warganya. Kedua, otonomi daerah perlu menghasilkan akuntabilitas yang terjamin dengan baik. Dan yang ketiga, bagaimana otonomi daerah dapat berusaha untuk responsif, di mana masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah di tuntut agar mewujudkan good gevernance di di daerahnya masing-masing agar pemerintah dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. S

Menurut Indrajit (2006:36), E-government adalah sebuah cara baru untuk berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan.

E-Government adalah implementasi pemerintahan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif. Fokus utama dari E-Government adalah penggunaan teknologi

informasi yang mampu memperkuat interaksi antara pemerintah dan berbagai pihak, seperti masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga lain. Indrajit (2006:1) mengungkapkan bahwa, berbeda dengan E-Commerce atau E-Business yang lebih bersifat umum, E-Government sering kali didefinisikan dengan cara yang bervariasi oleh banyak orang atau kelompok. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:

a. Meskipun E-Government memiliki prinsip dasar yang bersifat universal, definisi dan ruang lingkupnya bervariasi karena setiap negara menghadapi skenario implementasi yang berbeda;
b. Rentang penerapan aplikasi E-Government sangat luas karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah suatu negara dalam mengatur masyarakat melalui berbagai interaksi dan transaksi;
c. Pemahaman dan penerapan E-Government di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga cara pandangnya sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, dan kondisi ekonomi negara tersebut; dan
d. Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa

Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:18) dinyatakan bahwa penggunaan teknologi E-Government merupakan tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya transformasi dalam administrasi publik agar lebih efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Secara bertahap, meskipun tetap tidak menghilangkan batas-batas negara dan budaya yang sebelumnya homogen dan dominan, sekarang bergerak menuju suatu kondisi yang lebih beragam dan demokratis.

Budi Rianto dan timnya (2012:36) berpendapat bahwa E-Government merupakan penggunaan teknologi telematika serta teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan pemerintahan. Penerapan E-Government membuka peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan interaksi antar berbagai lembaga pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Keterhubungan ini

dibangun melalui pemanfaatan teknologi informasi yang menggabungkan komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dkk (2012:39) mengemukakan bahwa terdapat minimal empat tolok ukur keberhasilan E-Government, yaitu:

1. Tersedianya data dan informasi di pusat data.
2. Tersedianya data dan informasi untuk keperluan promosi daerah.
3. Tersedianya aplikasi E-Government yang mendukung kegiatan kantor dan pelayanan publik.
4. Tersedianya aplikasi dialog publik untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah, serta antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui e-mail, SMS, atau telekonferensi.

Di samping itu, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pengembangan E-Government diarahkan untuk mencapai empat sasaran menurut Inpres RI No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan layanan publik yang berkualitas dan mencakup luas, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh dan dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia kapan saja tanpa terhalang waktu dan dengan biaya yang mampu dijangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat..
3. Menciptakan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, serta menyediakan fasilitas untuk dialog publik agar masyarakat dapat ikut serta dalam penyusunan kebijakan negara.
4. Mengembangkan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien guna mempermudah transaksi serta layanan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang otonom.

Menurut Indrajit (2006:5), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan konsep e-Government di suatu negara, antara lain:

1. Meningkatkan mutu layanan pemerintah kepada berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat, sektor bisnis, dan industri), terutama dalam hal

efektivitas dan efisiensi di berbagai aspek kehidupan bernegara.

2. Menaikkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Governance.

3. Secara signifikan, mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun stakeholders untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4. Memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengakuisisi sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Menciptakan lingkungan sosial baru yang dapat menangani permasalahan yang ada dengan tepat, sesuai dengan perubahan global dan trend yang berlangsung.

6. Memberdayakan masyarakat serta pihak lainnya sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang merata dan demokratis.

Sementara itu, menurut Tjahjanto dalam Agus (2016:24), manfaat paling penting dari penerapan e-Government adalah terciptanya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab (accountable) terhadap rakyatnya. Di samping itu, lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi, pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif, serta pelayanan publik akan lebih sesuai dengan tuntutan warga. Diharapkan melalui pengelolaan yang lebih efisien atas sumber daya, prosedur, dan teknologi informasi, tercipta pemerintahan yang lebih baik.

2.5 Pengertian E-Planning

E-Planning adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk mempermudah proses penetapan kebijakan dalam menyusun rencana pembangunan wilayah secara daring. Sistem informasi untuk perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas data yang diperoleh dan menjaga keselarasan perencanaan dari tingkat desa hingga Kabupaten/Kota untuk pemerintah lokal. Ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk penyusunan RENSTRA dan RENJA.

Juniawan (2019:288) mengungkapkan bahwa e-Planning adalah suatu metode baru dalam perencanaan yang muncul bersamaan dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menggantikan metode perencanaan yang manual atau berbasis kertas. Di sisi lain, menurut Virgiana, Sari, dan Rasuli (2018:18), pembuatan e-Planning berbasis komputer

bertujuan untuk mencapai keakuratan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pembangunan daerah yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga ke penganggaran APBD. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah praktik penumpang gelap dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses penyusunan rencana APBD, karena kesalahan tersebut bisa berdampak negatif pada perencanaan di masa yang akan datang. E -Planning juga merupakan salah satu cara untuk mencapai transparansi yang diharapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menciptakan Good Governance.

Menurut Nugroho dalam Arianto (2019:145), E-Planning didefinisikan sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait proses perencanaan pembangunan daerah, dan diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas dan program yang akan datang agar tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat sejalan dengan target rencana yang telah ditetapkan.

Mirza dalam Abe. (2019:6) menyatakan bahwa untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selaras dengan keadaan masyarakat, diperlukan pengembangan sistem berbasis komputer yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga ke pusat.

Sementara itu, pada pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 yang membahas tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa untuk menerapkan perencanaan pembangunan secara elektronik atau e-planning, salah satu persyaratan utama yang harus ada di suatu daerah adalah adanya fitur partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dokumen rencana pembangunan daerah di dalam sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem e-planning sangat menekankan pentingnya peran serta keterlibatan masyarakat sebagai elemen krusial dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama pada tahap penyusunan rencana pembangunan daerah.

2.5. Sistem E-Planning

Secara etimologis, kata "sistem" berasal dari bahasa Latin (systēma) dan Yunani (sustēma), yang biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan dalam suatu keseluruhan. Istilah ini muncul dalam banyak bidang ilmu, sehingga artinya

bisa berbeda-beda tergantung pada situasi. Secara umum, "sistem" dapat diartikan sebagai sekumpulan objek yang saling berhubungan..

Menurut Harijono Djojodihardjo dalam Reni (2021:45), sistem adalahkombinasi objek yang memiliki hubungan fungsional dan saling terkait, sehingga membentuk kesatuan yang berfungsi. Sementara itu, Indrajit dan Reni (2021:45) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan komponen yang saling terhubung. E-Planning, atau sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah, berfungsi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Renja-OPD, dan RKPD. Sistem ini dirancang agar dokumen perencanaan dapat dibuat dengan lebih mudah, cepat, dan akurat, mengikuti regulasi dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Prosedur Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, juga mengatur Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah, serta prosedur untuk perubahan rencana tersebut. Menurut Silva dalam Wayan Dedi Juniawan (2019:34), E-Planning adalah metode modern dalam perencanaan yang muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi.dan komunikasi yang semakin luas.

terutama internet, sistem informasi geografis, dan teknologi realitas virtual, berlawanan dengan sistem perencanaan yang berbasis kertas atau manual yang tergolong sebagai sistem perencanaan tradisional. E-Planning juga sering kali dianggap sama dengan e-Government atau pemerintahan digital yang diterapkan dalam sektor perencanaan kota dan daerah.

E-Planning dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang berguna untuk memproses data serta informasi, menyusun, memantau, dan mengevaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara digital. Melalui aplikasi e-Planning ini, diharapkan BAPPEDA mampu memaksimalkan dan menyajikan analisis yang sangat krusial bagi para pemangku kepentingan. E-Planning berfungsi sebagai alat bantu bagi BAPPEDA dalam menyusun perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta berperan sebagai koordinator dalam penyusunan program kerja OPD, sehingga secara keseluruhan tujuan dari penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Mengembangkan program untuk perencanaan dan pembangunan daerah, yang

terhubung dalam sistem online dan offline. Terjadi interaksi serta sistem informasi yang memperluas hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat;

2. Secara bertahap meningkatkan citra aparatur pemerintah sebagai pelayan negara dan masyarakat yang bisa bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan profesional;

3. Menciptakan kemudahan bagi aparatur pemerintah dalam mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan daerah;

4. Terjalinnya interaksi dan sistem informasi yang memperluas hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam sistem aplikasi e-Planning terdapat empat modul, yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Harga, yaitu aplikasi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standard Biaya (ASB);
2. E-Musrenbang, yaitu aplikasi pelaksanaan rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD sampai dengan Penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) OPD;

3. E-Pokir, yaitu aplikasi yang digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan pokok pikiran mereka;

4. Perencanaan yang berkelanjutan adalah penerapan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja untuk Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

2.6. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tujuan organisasi untuk masa depan, serta menentukan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya (Rustiadi et al, 2009). Dengan kata lain, perencanaan melibatkan pengidentifikasian tujuan dan strategi, merinci tugas yang harus dilakukan, serta menyusun jadwal untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28), perencanaan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan demi mencapai tujuan tertentu. Perencanaan merupakan metode untuk

mencapai tujuan dengan cara yang paling optimal, memanfaatkan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien. Proses ini bersifat berkelanjutan dan mencakup dua aspek utama: penyusunan rencana dan pelaksanaannya. Rencana berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mengevaluasi kemajuan kegiatan, karena rencana berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan (Listyangsih, 2014:90).

Definisi perencanaan dapat dipahami sebagai hubungan antara kondisi saat ini (apa yang ada) dan kondisi ideal yang diharapkan (apa yang seharusnya ada), yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menetapkan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber daya. Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2011:49), rencana terdiri dari serangkaian keputusan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat diterapkan di berbagai bidang, tetapi tidak semua rencana berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, berupaya menentukan arah kebijakan pembangunan yang harus diambil di suatu wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan wilayah tersebut. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

2.7. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai tujuan suatu negara. Proses pembangunan melibatkan berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain. Pembangunan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang disebut perencanaan pembangunan, di mana peran pemerintah sangat penting, terutama dalam fase perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu panduan dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas untuk meraih tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014:92).

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan,yaitu:

1. Pemilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

2. Pilihan diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan untuk pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu periode tertentu sehingga perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan pembangunan selalu merupakan proses yang berulang tanpa keputusan yang final.

Perencanaan berkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan oleh pemerintah. Perencanaan diperlukan karena permintaan untuk pembangunan melebihi sumber daya yang ada. Dengan perencanaan, berbagai aktivitas pembangunan dapat diidentifikasi agar dapat mencapai hasil yang optimal dengan cara yang efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh banyak hal dan jenis intervensi yang dianggap perlu dalam suatu ekonomi untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa.

Dalam konteks ruang lingkup, perencanaan pembangunan bisa dibedakan menjadi perencanaan nasional, sektoral, dan spasial. Dari perspektif tingkat pemerintahan, perencanaan pembangunan mencakup rencana di tingkat pusat dan daerah. Jika dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Dalam hal proses dan mekanisme, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, serta bisa merupakan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Listyaningsih, 2014:93).

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisie, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagi berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerh, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Dari penjelasan yang diberikan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang ditentukan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah.

2.8. TOE (TechnologyOrganizationEnviromentFramework)

Kerangka TOE dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990) sebagai salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan implementasi teknologi dalam suatu organisasi. TOE Framework mengidentifikasi tiga dimensi utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi, yaitu: konteks teknologi (technological context), konteks organisasi (organizational context), dan konteks lingkungan (environmental context).

1. Konteks Teknologi (Technological Context)

   Konteks ini mencakup segala aspek teknis yang berkaitan dengan teknologi yang akan diadopsi, termasuk infrastruktur yang tersedia, tingkat keamanan, kompatibilitas sistem, dan kualitas jaringan. Dalam kasus implementasi sistem e-planning, gangguan pada fasilitas jaringan internet yang tidak stabil merupakan bagian dari tantangan dalam konteks teknologi. Ketersediaan jaringan yang andal merupakan prasyarat penting agar sistem digital dapat berfungsi secara optimal. Ketidakstabilan jaringan dapat menghambat akses, memperlambat proses input data, dan mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem yang diterapkan.

Mengacu pada teknologi yang tersedia bagi organisasi, baik yang sudah ada di dalam maupun yang tersedia di pasar. Aspek ini meliputi:

- Infrastruktur teknologi
- Kesesuaian teknologi
- Kompleksitas dan kompatibilitas sistem
- Keamanan dan keandalan sistem

2. Konteks Organisasi (Organizational Context)

   Konteks organisasi mencakup sumber daya internal, struktur organisasi, budaya kerja, serta proses formal seperti prosedur dan kebijakan. Dalam konteks ini, lemahnya Standard Operating Procedure (SOP) mencerminkan rendahnya tingkat kesiapan organisasi dalam mengelola sistem e-planning. SOP yang tidak kuat akan menyebabkan tidak adanya panduan baku yang dapat dijadikan acuan, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan serta inkonsistensi dalam pengambilan keputusan.

   Mencakup karakteristik dan sumber daya internal organisasi yang dapat memengaruhi adopsi teknologi, seperti:

   - Ukuran organisasi
   - Struktur organisasi
   - Kualitas SDM dan budaya organisasi
   - Dukungan manajemen
   - Ketersediaan anggaran

Selain itu, keterbatasan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam penggunaan teknologi informasi juga termasuk dalam dimensi organisasi. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kapasitas yang memadai akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi dan memanfaatkan sistem e-planning secara maksimal. Tanpa pelatihan yang memadai dan dukungan teknis yang berkelanjutan, sistem yang diterapkan cenderung tidak berjalan efektif dan dapat menimbulkan resistensi dari pengguna.

Dalam sistem e-Planning, regulasi seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017 atau Perpres No. 95 Tahun 2018 (SPBE) sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem karena menjadi landasan hukum sekaligus pendorong bagi daerah untuk melaksanakan digitalisasi.

3. Konteks Lingkungan (Environmental Context)

   Meskipun dalam kasus ini belum secara langsung disebutkan tekanan eksternal, TOE Framework juga mencakup faktor lingkungan seperti regulasi pemerintah, tekanan dari lembaga pengawas, tren industri, dan permintaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Dalam konteks

sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), lingkungan eksternal seperti kebijakan nasional tentang digitalisasi perencanaan pembangunan juga dapat menjadi pendorong atau penghambat terhadap keberhasilan implementasi e-planning.

Mengacu pada lingkungan eksternal tempat organisasi beroperasi, meliputi:

Pertama, **regulasi pemerintah** menjadi pendorong penting dalam digitalisasi sistem perencanaan pembangunan. Kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), regulasi mengenai proses perencanaan pembangunan daerah, serta standar keamanan dan tata kelola TI pemerintah secara langsung menuntut instansi untuk mengadopsi sistem e-planning. Tingkat kesesuaian implementasi sistem dengan regulasi tersebut dapat menjadi faktor penentu keberhasilan; apabila instansi telah menyesuaikan dengan kebijakan nasional, maka proses adoptif cenderung berjalan lebih baik. Sebaliknya, ketidaksesuaian atau kurangnya dorongan regulatif dapat menjadi penghambat.

Kedua, **tekanan eksternal** dari masyarakat, pemangku kepentingan, maupun lembaga pengawas juga berpengaruh terhadap penerapan e-planning. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh transparansi dan keterbukaan informasi mendorong instansi memperkuat digitalisasi perencanaan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Bappenas, Inspektorat, dan BPK mengharuskan adanya integrasi data, auditabilitas, serta bukti digital yang terdokumentasi dalam proses perencanaan. Tingginya tekanan eksternal ini dapat mempercepat adopsi sistem, sedangkan tekanan yang rendah dapat menyebabkan implementasi berjalan lambat dan kurang prioritas.

Ketiga, **dorongan atau benchmarking dengan instansi lain** turut menjadi faktor pemicu. Dalam konteks pemerintahan, persaingan bukan bersifat komersial, melainkan berupa motivasi untuk mencapai standar yang sama atau lebih baik dibandingkan instansi lain yang telah berhasil menerapkan e-planning. Evaluasi SPBE nasional, contoh praktik baik dari daerah lain, serta upaya peningkatan peringkat kinerja instansi menjadi pemicu munculnya inisiatif digitalisasi. Jika instansi tidak merasakan dorongan tersebut, maka motivasi internal untuk memperkuat sistem e-planning cenderung lebih rendah.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa **konteks lingkungan memiliki peran signifikan terhadap dinamika implementasi e-planning**. Regulasi, tekanan eksternal, dan dorongan kompetitif antar-instansi dapat berfungsi sebagai pendorong kuat, namun jika elemen-elemen ini lemah, maka proses adopsi teknologi cenderung berjalan stagnan.

2.9 Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya ini mencakup berbagai penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti lain dalam bentuk proposal, jurnal penelitian, dan berfungsi sebagai alat pembanding yang membantu penulis menyusun proposal ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Skripsi dengan **judul Analisis Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut**) yang ditulis oleh Agnesya Sisilia Mait, Jhony Lumolos, dan Donald Monintja. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tantangan dalam penerapan sistem E-Planning di Bappeda Sulut. Salah satu hasil penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Bappeda memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terampil, kualitas SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain masih kurang memadai, sehingga menghambat proses input data dan berdampak pada perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, ketiadaan peraturan daerah yang mendukung implementasi sistem E-Planning menyebabkan kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

2. Skripsi berjudul **Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kota Palembang** yang ditulis oleh putra

Trimbawan, Kemas Muhammad Iqbal, Masayu Syawalia Agustina, Mardian Suherli, dan Riza Adrianto Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem E-Planning di Bappeda Litbang Kota Palembang dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

3. Skripsi berjudul **Studi Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning di Kabupaten Muaro Jambi** oleh Yulia Siska, Syaiful Anwar, Siti Aisyah

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung Penelitian ini menganalisis

penerapan perencanaan pembangunan berbasis E-Planning di Kabupaten Muaro Jambi. Hasilnya menunjukkan bahwa materi atau muatan dalam E-Planning sebagian besar sesuai dengan tata laksana perencanaan pembangunan daerah,

namun masih ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan. Studi ini menyarankan penyesuaian lebih lanjut agar E-Planning dapat lebih efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian

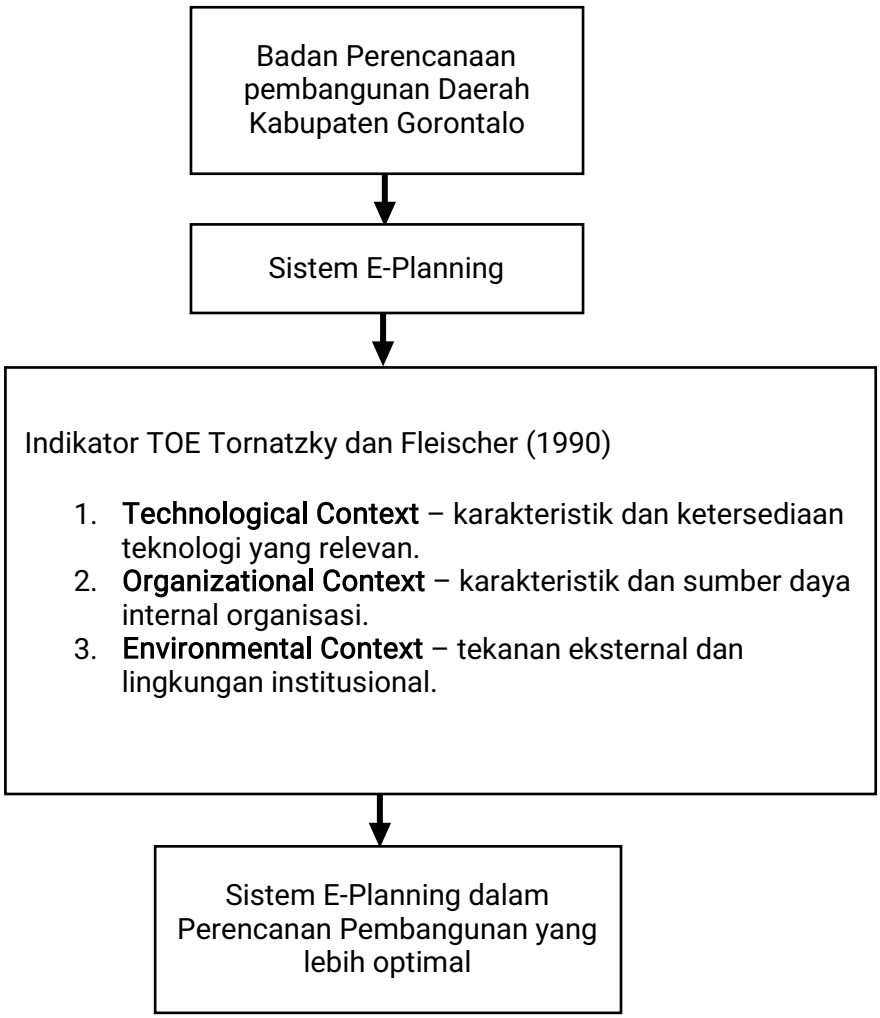
Agnesya Sisilia Mait, Johny Lumolos, dan Donald Monintja 2020	Analisis Penerapan Sistem E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian.	persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian bagaimana sistem ini digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun rencana pembangunan daerah secara lebih transparan, akurat, dan efektif.
Putra Trimbawan, Kemas Muhammad Iqbal, Masayu Syawalia Agustina, Mardian Suherli, dan Riza Adrianto 2022	Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang Kota Palembang	Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah berbeda lokasi dan fokus analisisnya .	Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian adalah penelitian kedua sama-sama mengkaji implementasi E-Planning di Bappeda dalam pembangunan daerah
Yulia Siska, Syaiful Anwar, Siti Aisyah 2020	Studi Penerapan Perencanaan Pembangunan	Perbedaan dari penelitian	persamaan penelitian sebelumnya

Berbasis e-Planning di Pemerintah Kota Jambi	penulis dengan penelitian ini adalah berbeda lokasi dan sudut pandangnya.		kedua penelitian sama-sama mengkaji peran E-Planningdalam perencanaan pembangunan daerah

2.10 Kerangka Pikir

Berikut adalah gambaran dari hubungan variable penelitian yang akan di teliti

Gambar 1.1 kerangka berpikir



BAB III
METODEOLOGI PENELITIAN

1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan fokus kualitatif. Menurut Narbuko dan Achmadi (2014:44), penelitian deskriptif adalah tipe studi yang berupaya untuk menggambarkan situasi yang ada saat ini berdasarkan data yang tersedia, sehingga mencakup penyajian data, analisis, dan interpretasi; dan dapat juga bersifat komparatif serta korelatif.

Tipe penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2015:26) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RandD menyatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada olahan proses dan arti dengan memberikan deskripsi tentang suatu masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memahami atau menggambarkan keadaan dari peristiwa yang diteliti atau analisis yang dilakukan terhadap satu variabel saja, tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan dengan variabel lainnya.

1.2. Kehadiran Peneliti

Peneliti berperan sebagai individu kunci yang tentunya perlu menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan demi kepentingan penelitian, sehingga keberadaan mereka di lokasi penelitian dapat dikenali oleh subjek yang diteliti. Sebagai pengamat yang ikut serta, peneliti terlibat langsung di lapangan dengan tujuan mengumpulkan informasi agar data yang diperoleh benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.3. Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52), tempat penelitian adalah area di mana proses evaluasi yang digunakan untuk mencari solusi masalah penelitian terjadi. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73), lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilaksanakan. Lokasi penelitian ini berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan,mulai bulan 19 maret 2025 sampai dengan 10 mei 2025.

1.4. Sumber Data

Menurut Iskandar (2008:252-254) data dan informasi yang menjadi bahan baku penelitian adalah data primer dan data sekunder.

Penelitianyangakandilaksanakan memakai 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber informasi utama yang berasal dari ucapan dan perilaku individu yang sedang diamati atau diwawancarai. Informasi ini dikumpulkan secara langsung dari narasumber setelah mereka memberikan penjelasan, reaksi, dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti..

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian : 1 orang
- Sub Koordinator perencana :1 orang
- Kepala Bidang Penelitian :1orang
- Staf Koordinator Bidang Perencanaan :1orang
- Staf Bagian IT :1 orang
- Staf Kepegawaian :1orang
- Komisi III DPRD :1orang

Jumlah :7orang

2. Data Sekunder

   Data yang di peroleh yang bersumber dari instansi, perpustakaan ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian.

1.5. Prosedur Pengumpulan Data

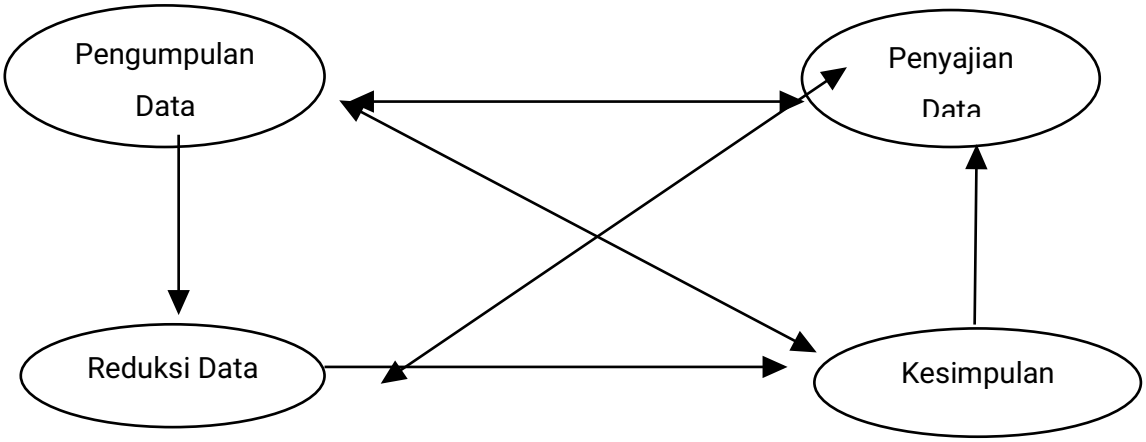
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan objek penelitian secara lisan melalui data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada informan. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, di mana peneliti mendatangi lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung dengan mengunakan panca indera. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang ada dilapangan. Dari hasil observasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas bahwa tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung.
2. Wawancara, mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan kepada informan kemudian mencatatnya sebagai data yang akan diolah nanti dalam penelitian.Pengumpulan data dilakukan melalui pertayaan secara lisan kepada informan yang dilakukan oleh peneliti.
3. Telaah dokumen, mengumpulkan data melalui bahan yang tertulis, berupa dokumen-dokumen review hasil penelitian, buku, jurnal dan melalui media internet yang membahas penelitian yang hampir sama. Dengan tujuan untuk dijadikan bahan kajian dan referensi.

1.6. Analisis Data

Analisis data dalam studi kualitatif dilaksanakan sebelum penelitian dimulai, saat berada di lokasi, dan setelah kegiatan lapangan selesai. Proses analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisir informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengelompokkan data, merinci ke dalam bagian-bagian, menggabungkan informasi, menyusun dalam suatu struktur, memilih informasi yang signifikan untuk diteliti, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain (Siyoto dan Sodik, 2015). Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan/verifikasi (Siyoto dan Sodik, 2015).



Gambar 2. 1 komponen-komponen analisis data model interaktif

SUMBER:MILES,M.B. DAN HUBBERMAN,A.M. DAN SALDANA,(2014) QUALITATIVE DATA ANALYSIS

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di ananlisa melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data di lapangan dari sumber-sumber data yang telah dipilih dengan menggunakan teknik pengumpuln data tertentu. Langkah pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan sebelum data yang diperlukan belum memadai dan akan diberhentikan bila data yang diperlukan sudah cukup.

2. Reduksi data

   Merupakan proses seleksi pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dilapangan. Reduksi ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan.

3. Penyajian data

   Yaitu upaya penyusunan sekumpulan informasi untuk kemudian

disajikan dan ditelaah lebih lanjut secara mendalam sehingga nantinya memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Yaitu menyimpulkan dari pemaparan berdasarkan hasil analisa data atau fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian sehingga nantinya diharapkan dapat menemukan suatu prinsip atau prosedur baru.

1.7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti mengunakan teknik sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

   Pada teknik ini dilakukan pencarian keadaan,cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Triangulasi

   Pada teknik ini peneliti memanfaatkan sumber dan metode sebagai pendukung dalam pemeriksaan. Pada teknik ini dilakukan pengalian data yang sama dari berbagai sumber untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding utama terhadap data tersebut.(Sugiyono, 2015:277).

1.8. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa tahap penelitian yaitu:

1. Tahap Orientasi

   Dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang dikaji, kegiatan ini seperti mengadakan obsevasi dan mempelajari dokumen yang relevan. Pada tahap ini akan dikumpulkan data seluas-luasnya dan ditentukan hal-hal yang paling menonjol untuk diteliti.

2. Tahap Eksplorasi Terpusat

   Tahap eksplorasi yaitu pengumpulan data yang lebih terarah pada fokus penelitian. Dimana menganalisis informasi- informasi yang berhasil dikumpulkan pada tahap pertama, dan atas dasar analisis tersebut dibuat sketsa wawancara dan obsevasi yang lebih terstruktur.

3. Menetapkan Instrumen

   Dalam penelitian terdapat instrumen utama yaitu peneliti dengan kata lain manusia sebagai instrumen, karena manusia sebagai instrumen memiliki keuntungan sebagai responsif dan tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.

4. Tahap Pengecekan data

   Peneliti akan mengecek kembali kredibilitas informasi-informasi yang telah berhasil dikumpulkan dan pengecekan ditujukan kepada pemberi informasi tersebut. Pada tahapan ini dapat dilihat konsistensi informasi dan dapat dihindari penafsiran yang keliru terhadap informasi yang diberikan.

5. Melaksanakan penelitian

   Peneliti akan melaksanakan penelitian sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

6. Mengelola dan menganalisis data

   Mengelola dan menganalisis data akan dilakukan untuk kepentinga penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

Tabel 2 J adwal Tahapan Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				
		Jan 2025	Feb 2025	Mart 2025	Apr 2025	Juni 2025
1.	Pra Observasi					
2.	Acc Judul					
3.	Penyusunan Laporan					
4.	Seminar Proposal					
5.	Revisi Proposal Penelitian					
6.	Operasional Penelitian					
7.	Revisi Hasil Penelitian					
8.	Bimbingan					
9.	Penyusunan Laporan Akhir					

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum BAPELITBANGDA (Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah) Kabupaten Gorontalo.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPPEDA) Kabupaten Gorontalo di bentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 tahun 2011* tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo.* Dengan adanya *Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016*, pada Bulan Januari 2017 BAPPPPEDA beralih status menjadi Badan Perencanaan, karena Badan Penelitian dan Pengembangan sudah menjadi satu Organisasi Pemerintah Daerah yang baru.

Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan pembangunan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kantor ini berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, serta melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana pembangunan.

Seiring waktu, Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo mengalami perubahan dalam struktur organisasi dan tugas pokok. Pada awal berdirinya, kantor ini dikenal dengan nama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, dengan adanya perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, kantor ini berganti nama menjadi Bappeda dan Litbang Kabupaten Gorontalo.

Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kantor ini juga berperan aktif dalam memfasilitasi kerjasama dengan pihak eksternal seperti perguruan

tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta guna memajukan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Gorontalo, Kantor Bappeda terus mengalami perubahan dalam hal struktur organisasi, tenaga pegawai, dan pendekatan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Sejarah Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Melalui program-program strategis, kantor ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Gorontalo.

4.1.2. Visi Dan Misi Instansi

V I S I

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan telah menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Badan Perencanaan sebagai perencana yang handal dan partisipatif menuju Kabupaten Gorontalo Gemilang ”.

M I S I

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Badan Perencanaan sebagai salah satu OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan Perencaan Pembangunan Daerah dan Statistik selama lima tahun kedepan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026.

Visi pembangunan pemerintah kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 adalah:

“Gorontalo Gemilangan Dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka di tetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

1. Membangun Manusia Tangguh dan Produktif
2. Tata kelola Pemerintahan Bersih Dinamis dan Terpercaya

3. Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah, Membuka Konektivitas
5. Pembangunan Berbasis Kependudukan Dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Menelaah ke lima misi kepala daerah dihubungkan dengan pelayanan pada badan perencanaan kabupaten Gorontalo sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian misi kedua yaitu tata Kelola pemerintahan, bersih, dinamis, dan terpercaya dengan sasaran terwujudnya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, selaras dan konsisten antara lain melalui:

- Peningkatan sselaran RKPD terhadap RPJMD,
- Peningkatan keselarasan APBD terhadap RKPD
- Peningkatan keselarasan DPA terhadap Renja SKPD,dan
- Peningkatan capaian indikator RPJMD

Dukungan badan perencanaan terhadap pelaksanaan kedua misi tersebut adalah dalam konteks perencanaan secara umum dan upaya pencaian sasaran strategis sesuai indikator yang menggambarkan sejauh mana kedua misi tersebut dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai visi daerah tahun 2021-2026.

4.1.3. Tujuan Instansi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah (BAPELITBANGDA)
   a. Tugas Pokok

      Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021

   b. Fungsi

      Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

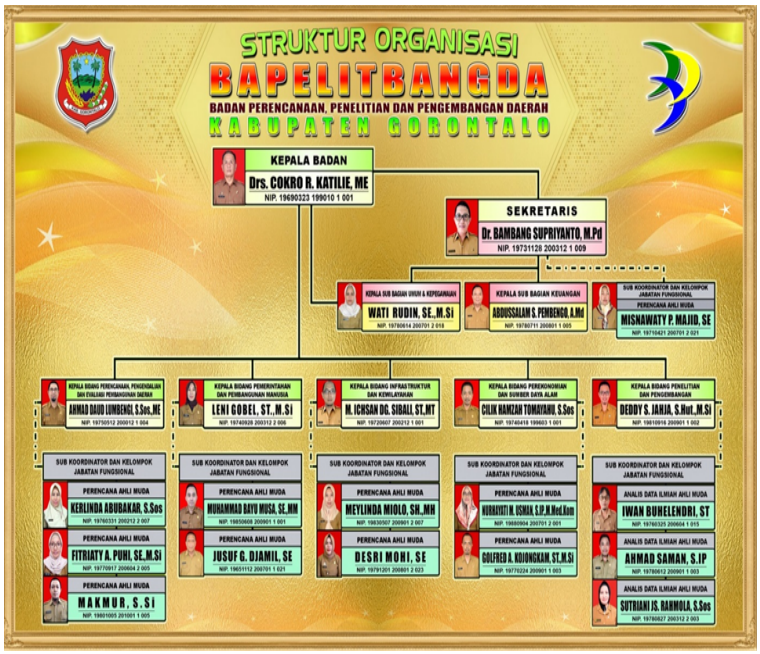
      1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

2. Pengkoordinasian program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan badan;

4.1.4. Struktur organisasi BAPELITBANGDA (Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah) Kabupaten Gorontalo

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Gambar 3 Struktur Organisasi Bappeda

4.2. Hasil Wawancara

Hasil penelitian bersumber dari data wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi sistem e-Planning, baik dari

aspek teknis, prosedural, maupun sumber daya manusia. Dalam penelitian ini,mengadopsi teori menurut Tornatzky dan Fleischer (1990) terkait : **Technological Context** – karakteristik dan ketersediaan teknologi yang relevan.**Organizational Context** – karakteristik dan sumber daya internal organisasi.**Environmental Context** – tekanan eksternal dan lingkungan institusional.

.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dapat dideskripsikan sebagai berikut;

1.2.1. Konteks Teknologi (Technological Context)

Dalam konteks TOE Framework, aspek teknologi menjadi elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan adopsi sistem informasi. Gangguan jaringan internet menjadi keluhan dominan yang disampaikan para informan:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan (Kepala Bidang penelitian) dengan pertanyaan Apakahsering ada kesulitan mengakses e-Planning karena jaringan internet dan beliau mengatakan :

> "*Sangat sering mengalami kesulitan saat mengakses sistem e-Planning, terutama pada saat mendekati batas waktu penginputan data.Seringkali halaman login tidak bisa terbuka atau malah eror ditengah proses input.pernah juga saya sudah input data sampai setengah jalan,lalu jaringan tiba-tiba terputus dan semua data hilang karena belum sempat terimpan.ini sangat menggangu, apalagi bagi kami operator yang harus memastikan data masuk tepat waktu .menurut saya,gangguan ini berkaitan erat dengan infrastruktur jaringan yang belum memadai. "(Wawancara,DSJ 06 mei 2025)*

kemudian(Staf Bagian IT Bappeda).beliau menjawab

> *"Sebagai bagian dari tim IT, saya sangat paham betapa seringnya gangguan jaringan ini terjadi. Apalagi saat seluruh OPD sedang mengakses sistem secara serentak, beban jaringan dan server meningkat, menyebabkan akses jadi lambat. Banyak laporan yang masuk dari pengguna internal dan eksternal, terutama dari kecamatan dan kelurahan. Seharusnya, penerapan e-Planning didukung oleh bandwidth yang cukup dan server yang responsif. TOE Framework menekankan bahwa*

keberhasilan adopsi sistem bukan hanya dari aspek organisasi dan SDM, tapi juga dari kesiapan teknologi. Kalau jaringan saja belum stabil, bagaimana sistem bisa berjalan dengan lancar."

(Wawancara ,GAK 06 mei 2025)

Selanjutnya tanggapan dari staf koordinator bidang perencanaan

"Kesulitan akses akibat jaringan internet memang menjadi masalah utama. Ada waktu-waktu tertentu, terutama di pagi hari saat banyak pegawai mengakses sistem secara bersamaan, e-Planning menjadi sangat lambat. Saya bahkan pernah harus menunggu hingga lebih dari satu jam hanya untuk membuka satu halaman input. Situasi ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan kadang membuat kita harus lembur demi mengejar ketertinggalan."(wawancara,MBM06 mei 2025)

Itulah tanggapan yang di berikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Staf Bagian IT Bappeda dan staf koordinator bidang perencanaan. kemudian apa langkah strategis yang harus diambil instansi untuk mengatasi masalah jaringan dan beliau mengatakan:

"Saya rasa perlu ada kebijakan yang jelas dari pimpinan daerah untuk mendukung penguatan jaringan, misalnya alokasi anggaran khusus untuk peningkatan layanan internet di Bappeda dan seluruh OPD. Selama ini masalah jaringan sering dianggap teknis semata, padahal ini menyangkut efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Saya juga setuju jika dilakukan koordinasi lintas instansi, misalnya dengan Dinas Kominfo, agar ada sinergi dalam penyediaan jaringan yang handal. TOE Framework menekankan pentingnya dukungan organisasi dalam mengadopsi teknologi, dan ini sangat relevan."(wawancara,GAK 06 mei 2025)

Sedangkan menurut pendapat sub koordinator perencanaan dan kepegawaian beliau menjawab:

“Solusi strategisnya mencakup aspek teknis dan manajemen. Saya mengusulkan audit menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan. Setelah audit tersebut, organisasi dapat membuat rencana untuk secara bertahap meningkatkan kapasitas jaringan. Pengadaan server lokal atau mirror juga dapat membantu

mengurangi ketergantungan pada koneksi luar. Selain itu, sangat penting bahwa prosedur standar operasional standar (SOP) untuk menangani gangguan jaringan disiapkan sehingga semua unit mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi kendala. Ini sejalan dengan dimensi organisasi dan teknologi dalam Framework Technology and Organization (TOE).”(wawancara,MPM 06 MEI 2025).

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber dan juga pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor teknologi, khususnya infrastruktur jaringan internet, menjadi penghalang utama dalam implementasi sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo. Masalah jaringan yang kerap terjadi, terutama saat jam sibuk dan mendekati tenggang waktu pengisian data, mengakibatkan keterlambatan dalam pekerjaan, kehilangan data, dan penurunan efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi—seperti yang diungkapkan dalam kerangka TOE—belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan dari organisasi dalam bentuk kebijakan strategis seperti pengalokasian anggaran khusus, peningkatan kapasitas jaringan, kerja sama antar instansi dengan Dinas Kominfo, serta audit infrastruktur dan penyusunan prosedur operasional standar untuk menangani gangguan. Semua langkah ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara aspek teknologi dan organisasi agar sistem e-Planning dapat berfungsi dengan baik dan mendukung perencanaan pembangunan secara efektif dan transparan.

Selain dari pihak internal Bappeda, wawancara juga dilakukan dengan anggota DPRD sebagai unsur pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan pertanyaan Apakah Komisi III mengetahui adanya kendala jaringan internet dalam pelaksanaan e-Planning di Bappeda?

"Ya, kami dari Komisi III telah menerima beberapa laporan mengenai kendala jaringan internet yang dialami di Bappeda Kabupaten Gorontalo. Gangguan ini memang cukup menghambat proses input data dan sinkronisasi informasi dalam sistem e-Planning, sehingga kami menyadari bahwa infrastruktur jaringan menjadi salah satu fokus yang perlu segera ditangani."(wawancara,SH 09 mei 2025)

Kemudian Bagaimana pandanganAnda terhadap kesiapan infrastruktur digital di lingkungan pemerintah daerah?

"Secara umum, kesiapan infrastruktur digital di pemerintah daerah sudah mulai berkembang, namun masih terdapat banyak tantangan, terutama terkait stabilitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat keras yang memadai. Untuk mendukung program digitalisasi seperti e-Planning, perlu ada investasi lebih besar dan strategi khusus agar infrastruktur bisa memenuhi kebutuhan operasional secara optimal."."(wawancara,SH 09 mei 2025)

Pernyataan anggota dewan tersebut memperkuat temuan dari pihak internal Bappeda, yaitu bahwa gangguan jaringan internet menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan sistem e-Planning, terutama dalam proses input dan sinkronisasi data

Dalam pengamatan saya terhadap penerapan e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo, gangguan jaringan internet menjadi keluhan utama dari hampir semua narasumber. Sistem yang lambat, gagal login, hingga hilangnya data akibat koneksi terputus terjadi terutama saat jam sibuk.Staf IT menjelaskan bahwa lonjakan akses membuat server kewalahan, sementara staf perencanaan harus bekerja lembur karena keterlambatan input. Bahkan DPRD mengakui adanya laporan terkait kendala ini dan menilai kesiapan infrastruktur digital masih belum memadai.Menurut saya, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi cerminan dari belum siapnya teknologi dalam birokrasi digital. Tanpa pembenahan seperti audit jaringan, peningkatan bandwidth, dan SOP penanganan gangguan, e-Planning tidak akan berjalan efektif dan hanya menjadi sistem yang sulit diandalkan.

1.2.2. Konteks Organisasi (Organizational Context)

Konteks organisasi dalam TOE Framework mencakup aspek internal organisasi yang berpengaruh terhadap adopsi dan implementasi teknologi, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, proses formal (termasuk SOP), serta dukungan manajerial. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua permasalahan utama yang berkaitan dengan dimensi organisasi, yaitu: (1) belum kuatnya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan e-planning, dan (2) kurangnya pemahaman serta keterampilan aparatur dalam penggunaan sistem e-planning.

Untuk memahami proses pelaksanaan sistem e-Planning secara menyeluruh, berikut ini disajikan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Bappeda Kabupaten Gorontalo. Alur ini menggambarkan tahapan-tahapan mulai dari persiapan hingga finalisasi dokumen perencanaan daerah melalui sistem e-Planning:



Gambar 4..Alur SOP Sistem E-planning BAPPPEDA

Sumber;Dokumen resmi Bappeda Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dengan Sub Koordinator perencanaan pertanyaan Apakah SOP terkait E-Planning sudah cukup jelas dan bisa dijadikan panduan dalam bekerja?" dan beliau mengatakan:

> *" SOP yang saat ini tersedia masih umum dan tidak kontekstual, menurut pendapat saya. Misalnya, karena tidak ada penyesuaian SOP berdasarkan struktur kerja di masing-masing bidang, setiap unit kerja tidak memahami alur input e-Planning dengan baik. Akibatnya, ada ketidakkonsistenan dalam cara kerja antar bidang. Saya pikir instansi perlu membuat SOP yang lebih detail."(Wawancara,06 mei 2025)*

Kemudian Kepala Sub Bagian Kepegawaian mengatakan,

> *"SOP tersedia, tetapi tidak semua orang mengetahuinya. Sebagian staf baru sama sekali belum diberi pengetahuan tentang prosedur operasi standar (SOP) ini. Akibatnya, dalam praktiknya, kami lebih suka bertanya kepada senior atau belajar sendiri melalui tes dan kesalahan. SOP harus ada dan disosialisasikansebagai materi pelatihan resmi."(wawancara,WR 06 mei 2025)*

Kemudian saat wawancara dengan Staf Kepegawaian Bappeda beliau mengatakan

> *" Menurut saya, prosedur operasi standar (SOP) saat ini kurang jelas. Dokumen yang diberikan tidak memberikan penjelasan teknis tentang langkah-langkah sistem, hanya garis besar alur kerja. Saya kadang-kadang bingung harus mulai dari mana dan tahapan apa yang harus dilakukan pertama. Jika Standar Operasi Prosedur (SOP) yang lebih rinci akan sangat membantu kami dalam bekerja lebih sistematis dan menghindari input yang salah."(wawanacara,FH 06 mei 2025)*

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta wawancara peneliti dengan sejumlah informan di Bappeda Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang saat ini

digunakan dalam pelaksanaan sistem e-Planning belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional yang nyata di lingkungan kerja. SOP yang tersedia bersifat umum dan cenderung tidak kontekstual, sehingga tidak mampu memberikan panduan teknis yang memadai bagi pegawai dari berbagai unit kerja.Dari wawancara yang dilakukan, seorang informan menyampaikan bahwa tidak adanya penyesuaian SOP dengan struktur kerja di masing-masing bidang menyebabkan perbedaan pemahaman dan penerapan alur kerja antar unit. Hal ini mengindikasikan bahwa SOP belum dirancang dengan pendekatan fungsional yang mempertimbangkan keragaman peran dan tanggung jawab antar bidang, sehingga muncul ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam proses input data pada sistem e-Planning.

kemudian wawancara dengan Kepala Bidang Penelitianterkait "Jika SOP belum tersedia atau belum kuat, bagaimana cara Anda menjalankan tugas terkait e-Planning?" beliau menjawab:

> *"Biasanya saya mencari tahu dari rekan kerja yang lebih dulu berpengalaman. Kami bekerja sama untuk memahami proses input e-Planning. Jika tidak ada prosedur operasional standar (SOP) yang dapat digunakan sebagai pegangan, saya akan belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan mengingat langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi metode ini pasti memiliki risiko."(Wawancara,DSJ 06 mei 2025*

Kemudian wawancara dengan Sub Koordinator perencanaan beliau menjawab

> *"Kalau SOP tidak tersedia, saya mengandalkan catatan pribadi yang saya buat setiap kali menjalankan proses input. Saya dokumentasikan langkah-langkah yang berhasil agar tidak lupa di tahun berikutnya. Ini memang tidak ideal, karena bisa berbeda dengan prosedur resmi. Tapi sejauh ini itu cara paling aman agar tidak salah langkah."(wawancara,06 MPM 06 mei 2025.)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya SOP (Standard Operating Procedure) yang kuat dan rinci dalam pelaksanaan e-Planning telah mendorong pegawai untuk menggunakan

metode alternatif yang bersifat informal dan individualistik. Staf Teknis Perencana, misalnya, mengandalkan pengalaman rekan kerja serta praktik.

Tahapan	Kondisi saat ini
Input program/kagiatan	Tidak semua OPD memahami format input
Verifikasi data	Tidak jelas siapa penanggung jawab tiap tahap
Validasi Data	Tidak terdokumentasi dengan jelas SOP.
Monitoring proses	Belum ada mekanisme kontrol yang sitematis.

Tabel hasil pengamatan peneliti

Dari hasil pengamatan peneliti Ketiadaan SOP yang kuat menyebabkan banyak pegawai mengalami kebingungan dalam penggunaan sistem, sesuai alur standard operating procedure (SOP) Ada beberapa tahapan yang tidak terjalankan dengan baik seperti input program/kegiatan tidak semua OPD memahami batasan format input,Verifikasi data tidak jelas siapa penanggung jawab tiap tahap, terjadi tumpang tindih pekerjaan, serta keterlambatan dalam input data. Hal ini menghambat tujuan utama dari e-Planning, yaitu menciptakan sistem perencanaan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

1.2.3. Kontex Lingkungan (Environmental Contect)

memengaruhi keputusan organisasi dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi. Faktor-faktor ini dapat berupa regulasi pemerintah, tekanan dari lembaga pengawas, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi secara umum, serta dukungan dari mitra eksternal.Dalam konteks penelitian ini, implementasi sistem e-planning di lingkungan instansi pemerintah tidak terlepas dari adanya dorongan eksternal, terutama dari regulasi nasional yang mewajibkan penerapan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan sistem e-government.

Kurangnya pemahaman teknis dalam menggunakan sistem e-Planning

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian IT terkait “Apa tantangan

teknis terbesar yang Anda alami saat mengoperasikan e-Planning?" beliau mengatakan:

> *"Tantangan teknis terbesar yang kami rasakan adalah pada integrasi sistem dan keandalan server. Beberapa kali kami mengalami kegagalan dalam menyimpan data atau sistem tiba-tiba logout sendiri saat proses input sedang berlangsung. Hal ini sangat merugikan karena data harus diinput ulang dari awal. Selain itu, belum ada sistem notifikasi yang jelas jika ada kesalahan atau penginputan yang belum lengkap, sehingga pengguna harus mengecek ulang satu per satu. Proses validasi pun kadang tidak otomatis, yang berpotensi menimbulkan kesalahan akumulatif dalam perencanaan. Dukungan teknis dari pengelola sistem juga belum maksimal ketika kendala terjadi."(wawancara,WR 06 mei 2025)*

Itulah hasil wawancara terkait tantangan teknis terbesaralami saat mengoperasikan e-Planning. Adapun wawancara dengan Sub Koordinator perencanaan terkait "Apa bentuk pelatihan atau dukungan teknis yang Anda butuhkan ke depan?" beliau mengatakan

> *"Ke depan, saya membutuhkan pelatihan yang lebih praktis dan berkelanjutan. Saat ini, pelatihan hanya diberikan pada saat awal penggunaan sistem, itupun dalam waktu yang singkat. Saya berharap ada pelatihan secara berkala, terutama saat ada pembaruan pada sistem e-Planning. Selain itu, pelatihan harus menyertakan simulasi langsung mulai dari proses login, input data, validasi, sampai penyimpanan akhir. Karena tanpa praktek langsung, kita sulit memahami alur sistem secara utuh. Adanya narasumber atau pendamping yang bisa menjawab pertanyaan teknis secara langsung juga akan sangat membantu."(wawancara,MPM 06 mei 2025)*

Kemudian kepala bidang penelitian menjawab

> *"Menurut saya, pelatihan yang ideal tidak hanya mencakup aspek teknis pengoperasian e-Planning, tetapi juga menyentuh pada pemahaman logika sistem dan bagaimana perencanaan pembangunan dikaitkan dengan sistem tersebut. Kadang pengguna hanya sekadar mengikuti alur, tanpa memahami tujuan atau*

konsekuensi dari langkah-langkah input yang dilakukan. Jadi, pelatihan berbasis studi kasus, dengan menjelaskan proses bisnis perencanaan, penting dilakukan. Selain itu, dibutuhkan juga pembekalan soft skills seperti manajemen data digital dan literasi teknologi, agar semua staf bisa lebih siap dalam menghadapi sistem yang berbasis digital."(wawancara, DSJ 06 mei 2025)

Dari hasil wawancara, saya melihat bahwa kurangnya pelatihan teknis menjadi kendala utama dalam penggunaan e-Planning. Pelatihan yang ada masih bersifat formalitas, tanpa pendampingan lanjutan. Banyak staf kesulitan karena tidak memahami alur sistem secara utuh. Menurut saya, pelatihan harus lebih praktis, rutin, dan menyentuh pemahaman logika sistem agar pengguna benar-benar siap dalam mengoperasikan e-Planning secara efektif.

4.3Pembahasan

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan dari masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan di tuangkan dalam sub bagian identifikasi masalah yaitu:

1.2.4. Konteks Teknologi (Technological Context)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa gangguan jaringan internetmerupakan permasalahan teknologi palingsignifikan yang menghambatkelancaran penggunaan sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo.

Dari berbagai tanggapan yang diperoleh, baik dari Kepala Bidang Penelitian, staf IT, maupun koordinator perencanaan, menunjukkan bahwa gangguan akses ke sistem sering terjadi, terutama pada saat jam sibuk atau menjelang batas waktu input data. Hal ini menyebabkan sistem menjadi lambat, halaman tidak terbuka, bahkan data yang sudah diinput bisa hilang jika koneksi terputus. Dalam banyak kasus, permasalahan ini memaksa staf untuk bekerja lembur agar target waktu tetap terpenuhi.ditemukan beberapa faktor teknologi yang menjadi penghambat optimalisasi sistem e-Planning, yaitu:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

   Fasilitas jaringan internet yang belum stabil masih menjadi kendala utama dalam pengoperasian sistem e-Planning. Beberapa informan menyatakan bahwa saat proses input data atau sinkronisasi, sistem sering mengalami kelambatan (lag), bahkan gagal menyimpan data. Hal ini menghambat kelancaran proses perencanaan pembangunan yang seharusnya dilakukan secara digital dan real-time.
2. Belum Optimalnya Integrasi Sistem

   Sistem e-Planning belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan lain seperti SIPD atau sistem internal OPD lainnya. Akibatnya, terjadi tumpang tindih data dan input ganda yang menyulitkan pengguna dalam memastikan konsistensi informasi antar platform.
3. Tingkat Keandalan dan Keamanan Sistem

   Sistem belum dilengkapi dengan mekanisme cadangan data (backup) dan pengamanan yang memadai. Beberapa petugas menyampaikan kekhawatiran terkait risiko kehilangan data akibat gangguan teknis, serta belum adanya SOP atau protokol keamanan data yang jelas.

Tornatzky dan Fleischer (1990), faktor teknologi dalam TOE Framework mencakup infrastruktur teknologi yang tersedia di dalam organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Ketidaksiapan infrastruktur seperti jaringan internet yang buruk dapat menjadi penghambat utama dalam adopsi dan implementasi teknologi baru. Dalam konteks ini, sistem e-Planning tidak dapat berfungsi optimal tanpa dukungan jaringan yang stabil dan andal.

Delone & McLean Information System Success Model (2003) menekankan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan merupakan indikator utama keberhasilan sistem informasi. Dalam hal ini, gangguan jaringan mengindikasikan rendahnya kualitas layanan teknologi, yang berdampak langsung pada kepuasan pengguna dan penggunaan sistem. Jika kualitas layanan tidak diperbaiki, maka tingkat adopsi dan efektivitas sistem akan menurun.

Berdasarkan interaksi yang dilakukan dengan staf Bappeda Kabupaten

Gorontalo,terungkap bahwa masalah koneksi internet adalah isu teknis utama dalam pelaksanaan sistem e-Planning banyak responden mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem karena koneksi internet tidak stabil.Masalah ini menyebabkan proses penginputan data menjadi lambat,bahkan dalam beberapa kasus sistem tidak dapat diakses sama sekali.Hak ini berdampak pada kinerja pegawai,mengganggu komunikasi antar unit,dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem. Isu ini menunjukan bahwa infrastruktur jaringan internet yang mendukung pengoperasian e-Planning secara maksimal.situasi ini tidak hanya berpeengaruh terhadap efektivitas kinerja,tetapi juga berdampak pada keberlanjutan dan akuntabilitas sistem informasi dalam perencanaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi adalah DeLone dan McLean Information System Success Model (2003). Model ini menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi dipengaruhi oleh enam dimensi utama, yaitu: kualitas sistem, kualitasinformasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (net benefits). Dalam konteks sistem e-Planning, dimensi ini menjadi penting untuk menilai apakah sistem telah mampu mendukung proses perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien. Rendahnya kualitas sistem dan layanan, misalnya, dapat menurunkan kepuasan pengguna dan menghambat pemanfaatan sistem secara optimal.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penulis menilai bahwa gangguan jaringan internet merupakan hambatan teknologi paling krusial dalam penerapan sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo. Ketidaksiapan infrastruktur, lemahnya integrasi sistem, dan rendahnya keandalan teknologi mencerminkan belum optimalnya kesiapan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam TOE Framework dan Technological Readiness Model. Situasi ini tidak hanya menghambat efisiensi kerja, tetapi juga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan dan penguatan dukungan teknis menjadi langkah mendesak yang harus diambil agar

sistem e-Planning dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Zhu dan Kraemer (2 005), kesiapan teknologi (technological readiness) merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan adopsi dan implementasi sistem informasi di suatu organisasi. Kesiapan ini mencakup tiga elemen utama, yaitu infrastruktur teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi, dan kompatibilitas sistem baru dengan sistem yang telah ada. Dalam konteks sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo, tantangan berupa gangguan jaringan, keterbatasan SDM teknis, serta belum optimalnya integrasi sistem menunjukkan bahwa kesiapan teknologi masih perlu ditingkatkan agar implementasi sistem dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

1.2.5. Konteks Organisasi (Organizational Context)

Berdasarkanpengamatan,dokumentasi,dan wawancara yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Gorontalo, teridentifikasi bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem e-planning adalah tidak adanya prosedur standar operasional (SOP) yang detail,jelas,dan sesuai konteks sebagai pedoman kerja. SOP yang saat ini ada masih dirasa terlalu umum tidak disesuaikan dengan struktur kerja masing-masing bidang,dan tidak memberikan petunjuk teknis yang cukup berkaitan dengan langkah-langkah penggunaan sistem. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam proses penginputan data antar unit kerja,serta kebingungan dalam proses penginputan.

dalam upaya mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah daerah mulai menerapkan berbagai sistem informasi, salah satunya adalah e-Planning. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi semata, melainkan juga oleh kesiapan internal organisasi sebagai pelaksana utama.

Dalam kerangka TOE (Technology-Organization-Environment) yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990), konteks organisasi mencakup elemen-elemen penting seperti dukungan pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, struktur kerja, budaya organisasi, dan alokasi sumber daya.

Di Bappeda Kabupaten Gorontalo, implementasi e-Planning masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berasal dari kelemahan dalam konteks organisasi. Permasalahan seperti belum tersosialisasinya SOP, kurangnya pelatihan teknis, dan rendahnya pemahaman pegawai terhadap alur sistem menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya siap secara internal dalam mendukung sistem ini.

Menurut Thong (1999), keberhasilan adopsi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga sangat bergantung pada konteks organisasi internal. Ia mengidentifikasi dua faktor utama dalam organisasi yang memengaruhi adopsi teknologi, yaitu dukungan manajemen puncak dan kompetensi teknologi internal. Dukungan dari pimpinan dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan motivasi kepada staf menjadi penentu utama dalam kelancaran proses implementasi. Sementara itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengelola sistem akan meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi. Dalam konteks e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan pimpinan dan kesiapan staf menjadi kunci optimalisasi sistem perencanaan berbasis digital.

Rummler & Brache (1990)Menurut Rummler dan Brache, SOP yang baik merupakan instrumen utama dalam mengelola proses organisasi, karena dapat menjembatani antara kebijakan manajerial dan pelaksanaan teknis di lapangan. Tanpa SOP yang kuat, proses kerja menjadi tidak standar dan rawan kesalahan, sehingga menurunkan efektivitas sistem informasi dalam organisasi.

Weiner (2009) Teori ini menjelaskan bahwa kesiapan organisasi terhadap perubahan teknologi bergantung pada kesiapan struktural, termasuk adanya aturan kerja yang jelas, seperti SOP. Jika SOP belum memadai, maka organisasi tidak sepenuhnya siap untuk menjalankan sistem digital secara konsisten dan berkelanjutan. SOP adalah bagian dari instrumen yang mencerminkan kesiapan struktural dalam menghadapi transformasi digital.

Hasil wawancara dengan sejumlah pegawai di Bappeda Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan sistem e-Planning belum sepenuhnya mapan dan berjalan dengan baik. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun

terdapat panduan teknis,namun masih kurang detail atau kurang disebarluaskan secara efektif.Hal ini mengakibatkan pegawai sering kali bergantung pada pengalaman terdahulu atau inisiatif pribadi dalam menjalankan tugas,yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara berbagai unit kerja.

Ketidak sesuaian SOP juga menimbulkan kebingungan dalam penugasan,cara penginputan data, serta tahap-tahap verifikasi dan validasi perencanaan.Situasi ini berpotensi menurunkan efektivitas dan ketepatan data yang masuk dalam sistem e-Planning.SOP yang tidak cukup kuat juga mempengaruhi kelangsungan sistem, karena pegawai baru atau pengguna yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan saat mencoba memahami jalur kerja sistem.

1.2.6. Kontex Lingkungan (Environmental Contect)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Gorontalo, diketahui bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis SDM dalam mengoperasikan sistem e-Planning. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya menguasai fitur-fitur dalam sistem, bahkan ada yang masih mengalami kesulitan dalam proses input dan validasi data.

Selain itu, pelatihan yang diberikan dinilai belum merata dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang setara dalam menggunakan aplikasi. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada personel tertentu yang dianggap lebih paham teknologi. Ketimpangan kapasitas ini juga berdampak pada efisiensi kerja serta akurasi perencanaan, karena proses penginputan dan pelaporan menjadi tidak optimal.

Masalah kurangnya keterampilan ini menunjukkan bahwa dari aspek organisasi dalam kerangka *Technology-Organization-Environment (TOE)*, faktor kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mendukung penerapan sistem informasi secara maksimal.

Parasuraman (2000) menjelaskan bahwa Technology Readiness adalah tingkat kesiapan individu untuk menerima dan menggunakan teknologi baru. Dalam konteks ini, kurangnya pelatihan dan pemahaman SDM menunjukkan rendahnya readiness, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi sistem digital. Agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal, organisasi perlu membangun kesiapan mental dan keterampilan teknis pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada dorongan kuat dari lingkungan eksternal untuk menerapkan sistem e-Planning, hambatan berupa minimnya dukungan teknis, ketidaksesuaian regulasi pusat-daerah, serta resistensi budaya menjadi tantangan yang signifikan dalam konteks lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten Gorontalo.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-Planning belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi hambatan dalam tiga aspek utama, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan. Dari segi teknologi, gangguan jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama yang menyebabkan sistem sering mengalami kelambatan, kesalahan, hingga tidak dapat diakses, terutama saat jam sibuk. Pada aspek organisasi, SOP yang ada masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing bidang, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses kerja. Sementara itu, dari sisi lingkungan atau sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis aparatur, termasuk pengelola sistem, serta pelatihan yang belum merata, menunjukkan rendahnya kesiapan individu dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan penerapan sistem e-Planning sangat bergantung pada perbaikan infrastruktur teknologi, penguatan struktur organisasi melalui SOP yang kontekstual, serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Perbaikan Infrastruktur Teknologi

   Bappeda Kabupaten Gorontalo perlu meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan internet, serta menyediakan cadangan jaringan dan memantau performa sistem secara rutin.
2. Penguatan SOP

Perlu penyusunan ulang SOP e-Planning yang lebih detail dan sesuai konteks tiap bidang, dengan melibatkan tim teknis dan pengguna sistem agar panduan kerja lebih efektif.

3. Pelatihan SDM

   Disarankan adanya pelatihan teknis rutin dan merata bagi seluruh pegawai, serta pembentukan tim pendamping di setiap bidang untuk membantu penggunaan sistem secara maksimal.

.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander, 2019, "*Perencanaan* Daerah Partisipatif", Pondok. Edukatif, Solo.

Agus Dwiyanto, 2016, Mewujudkaan *Good Governance* Melalui Pelayanan. Publik, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Ahmadi, Abu dan Narbuko. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi. Aksara

Arifin, Zainal. 2017. Adopsi Teknologi untuk Keunggulan Daya Saing. Jakarta: PT. PLN (Persero)

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*.

Denning, P. J., & Lewis, T. G. (2020). Technology adoption. *Communications of the ACM*, *63*(6), 27 29. https://doi.org/10.1145/3396265

Djalil, *Rizal*.2018. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca. Reformasi.Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka

Forman, E. M., Goldstein, S. P., Flack, D., Evans, B. C., Manasse, S. M., & Dochat, C. (2018). Promising technological innovations in cognitive training to treat eating-related behavior. *Appetite*, *124*. 68–77. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.04.011

Guntur setiawan, 2005. implementasi dalam birokrasi pembangunan. Jakarta: balai pustaka

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik, Malang; Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.

Indrajit, R. E. (2006). Electronic government: Konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi. Yogyakarta: Andi.

Jurnal Administrasi Publik Daerah (JAPD), *15*(2), 134–145. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/3424

Keban, T. Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,. Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta

Leny Nofianti. 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah. Pekanbaru.

Listyaningsih, *2014*. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu:yogyakarta.

Lukman Ali, 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Apollo

Manengal, J. F., Gosal, R., & Pangemanan, S. E. (2022).. *Jurnal Governance*, *6*(1), 75–84. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/44080

Mardiasmo. (*2018*). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mustafa, Delly. 2019. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: CV. Alfabeta.

Ningsih, Virgiana, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli. 2018. Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Ekonomi. Volume 26, Nomor 2. hal. 18-30.

Nitisastro, Widjojo. 2014. Pengalaman *Pembangunan* Indonesia: Kumpulan. Tulisan dan Uraian *Widjojo Nitisastro*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Nor, *Ghofur*. (*2014*). Manajemen Publik Pada Pemerintah. Jakarta: Bumi. Angkasa

Nurdin usman, 2012. Konteks implementasi berbasis kurikulum. Jakarta: grasindo

Paputungan, A. P., Kalangi, L., & Mamonto, L. A. (2023).

Pasolong, Harbani. 2018. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Prabayanti, H. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Biopestisida Oleh Petani Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

Purwanto dan sulistyastuti, 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijakan. Jakarta: bumi aksara

Putra, A. D. (2021). https://repository.uir.ac.id/11643/

Reni. 2021. Implementasi System E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi, Universitas Islam Riau

Rianto, Budi & Tri Lestari. 2012. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan. Publik. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN)

Sugiyono (*2015*). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.

Syafalevi. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Syafii, Inu Kencana, 2016, *Ilmu Administrasi publik*, Rineka Cipta, Jakarta

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,Jakarta : Rineka. Cipta

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Hasyr [59]: ayat 18*. Dalam Kementerian Agama Republik Indonesia (Ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.



Lampiran 1.Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ADELIA MAYANGGITA, NIM. D02421005. Lahir di GORONTALO pada tanggal 08 OKTOBER 2003 dari Ayah

yang bernama Alm.SISWOTO dan ibu yang bernama FRAMILA SUSANTI. Penulis merupakan anak tunggal. Tahun 2021 penulis lulus dari SMK NEGERI 1 MOOTILANGO dan pada tahun 2021 lulus seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) melalui jalur reguler seleksi masuk UMGo. Penulis memilih program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian: ***Penerapan Sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo***

Tujuan Wawancara:

Menggali kendala teknis, prosedural, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan e-Planning, termasuk peran pengawasan dan dukungan dari DPRD (Komisi III) terhadap pelaksanaan e-Planning.

A. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK APARATUR BAPPEDA

Identitas Narasumber

- Nama:
- Jabatan:
- Unit Kerja

Topik & Pertanyaan

1. Masalah Jaringan Internet yang Tidak Stabil

1. Apakah sering ada kesulitan mengakses e-Planning karena jaringan internet?
2. Menurut Anda, apa langkah strategis yang harus diambil instansi untuk mengatasi masalah jaringan?

2. SOP Belum Kuat Sebagai Acuan

1. Apakah SOP terkait E-Planning sudah cukup jelas dan bisa dijadikan panduan dalam bekerja?
2. Jika SOP belum tersedia atau belum kuat, bagaimana cara Anda menjalankan tugas terkait e-Planning?
3. Menurut Anda, apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki dari SOP saat ini?

3. Keterampilan dan Pemahaman Aparatur

1. Apa tantangan teknis terbesar yang Anda alami saat mengoperasikan e-Planning?
2. Apakah rekan-rekan Anda juga mengalami kesulitan yang sama?
3. Apa bentuk pelatihan atau dukungan teknis yang Anda butuhkan ke depan?

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK DPRD KOMISI III (Pengawasan Pembangunan)

Identitas Narasumber

- Nama:
- Jabatan:
- Komisi:

---

1. Pengawasan dan Tindak Lanjut Masalah Teknis

1. Apakah Komisi III mengetahui adanya kendala jaringan internet dalam pelaksanaan e-Planning di Bappeda?
2. Bagaimana pandangan terhadap kesiapan infrastruktur digital di lingkungan pemerintah daerah?

Lampiran 3.Daftar Informan Penelitian

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	Wati Rudin	WR	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
2	Misnawati P. Majid	MPM	Sub Koordinator perencana
3	Deddy S. Jahja	DSJ	Kepala Bidang Penelitian
4	Muhammad Bayu Musa	MBM	Staf Koordinator Bidang Perencanaan
5	Golfred A. Kojongkan	GAK	Staf Bagian IT
6	Fenny Hardiyanti	FH	Staf Kepegawaian
7	Safrudin Hanasi	SH	Komisi III DPRD

Lampiran 4.Matrix Hasil Wawancara

Deskripsi Hasil Wawancara Informan Penelitian

Pola Komunikasi Internal Kinerja Pegawai Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	INISIAL	TANGGAL WAWANCARA	HASIL WAWANCARA	KESIMPULAN
1.	Infrastruktur Jaringan	Apakah sering ada kesulitan mengakses e-Planning karena jaringan internet?	DSJ	06-05-2025	Sangat sering mengalami esulitan saat mengakses istem e-Planning, erutama pada saat endekati batas waktu enginputan data.Seringkali alaman login tidak bisa erbuka atau malah eror itengah proses put.pernah juga saya udah input data sampai etengah jalan,lalu jaringan ba-tiba terputus dan emua data hilang karena elum sempat terimpan.ini angat menggangu, apalagi agi kami operator yang arus memastikan data asuk tepat waktu menurut saya,gangguan i berkaitan erat dengan frastruktur jaringan yang elum memadai.	Gangguan akses terhadap sistem e-Planning yang sering terjadi, terutama saat mendekati batas waktu input, menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam kelancaran penginputan data oleh operator.
			GAK	06-05-2025	*"Sebagai bagian dari tim*	Kesiapan infrastruktur teknologi, terutama jaringan dan server, menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran sistem e-Planning. Tanpa dukungan teknis yang memadai, seperti bandwidth yang cukup dan

		IT, saya sangat paham betapa seringnya gangguan jaringan ini terjadi. Apalagi saat seluruh OPD sedang mengakses sistem secara serentak, beban jaringan dan server meningkat, menyebabkan akses jadi lambat. Banyak laporan yang masuk dari pengguna internal dan eksternal, terutama dari kecamatan dan kelurahan. Seharusnya, penerapan e-Planning didukung oleh bandwidth yang cukup dan server yang responsif. TOE Framework menekankan bahwa keberhasilan adopsi sistem bukan hanya dari aspek organisasi dan SDM, tapi juga dari kesiapan teknologi. Kalau jaringan saja belum stabil, bagaimana sistem bisa berjalan dengan lancar."	server yang responsif, adopsi sistem akan sulit berjalan optimal.
MBM	06-05-2025	*"Kesulitan akses akibat jaringan internet memang menjadi masalah utama. Ada waktu-waktu tertentu, terutama di pagi hari saat banyak pegawai mengakses sistem secara bersamaan, e-Planning menjadi sangat lambat. Saya bahkan pernah harus menunggu hingga lebih dari satu jam hanya untuk membuka satu halaman input. Situasi ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan kadang membuat kita harus*	

			lembur demi mengejar ketertinggalan."(wawancara,MBM06 mei 2025	
apa langkah strategis yang harus diambil instansi untuk mengatasi masalah jaringan	GAK	06-05-2025	*"Saya rasa perlu ada kebijakan yang jelas dari pimpinan daerah untuk mendukung penguatan jaringan, misalnya alokasi anggaran khusus untuk peningkatan layanan internet di Bappeda dan seluruh OPD. Selama ini masalah jaringan sering dianggap teknis semata, padahal ini menyangkut efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Saya juga setuju jika dilakukan koordinasi lintas instansi, misalnya dengan Dinas Kominfo, agar ada sinergi dalam penyediaan jaringan yang handal. TOE Framework menekankan pentingnya dukungan organisasi dalam mengadopsi teknologi, dan ini sangat relevan.*	Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah dan koordinasi lintas instansi sangat penting dalam memperkuat infrastruktur jaringan. Sesuai TOE Framework, keberhasilan adopsi sistem e-Planning memerlukan dukungan organisasi, termasuk alokasi anggaran dan sinergi antarinstansi.
	MPM	06-05-2025	Solusi strategisnya mencakup aspek teknis dan manajemen. Saya mengusulkan audit menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan. Setelah audit tersebut, organisasi dapat membuat rencana untuk secara bertahap meningkatkan kapasitas jaringan. Pengadaan server lokal atau mirror juga dapat membantu	

			mengurangi ketergantungan pada koneksi luar. Selain itu, sangat penting bahwa prosedur standar operasional standar (SOP) untuk menangani gangguan jaringan disiapkan sehingga semua unit mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi kendala. Ini sejalan dengan dimensi organisasi dan teknologi dalam Framework Technology and Organization.
Apakah Komisi III mengetahui adanya kendala jaringan internet dalam pelaksanaan e-Planning	SH	09-05-2025	*"Ya, kami dari Komisi III telah menerima beberapa laporan mengenai kendala jaringan internet yang dialami saat mengakses e-planning . Gangguan ini memang cukup menghambat proses input data dan sinkronisasi informasi dalam sistem e-Planning, sehingga kami menyadari bahwa infrastruktur jaringan menjadi salah satu fokus yang perlu segera ditangani.*
Bagaimana pandangan Anda terhadap kesiapan infrastruktur digital di lingkungan pemerintah daerah	SH	09-05-2025	*Secara umum, kesiapan infrastruktur digital di pemerintah daerah sudah mulai berkembang, namun masih terdapat banyak tantangan, terutama terkait stabilitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat keras yang memadai. Untuk mendukung program digitalisasi*

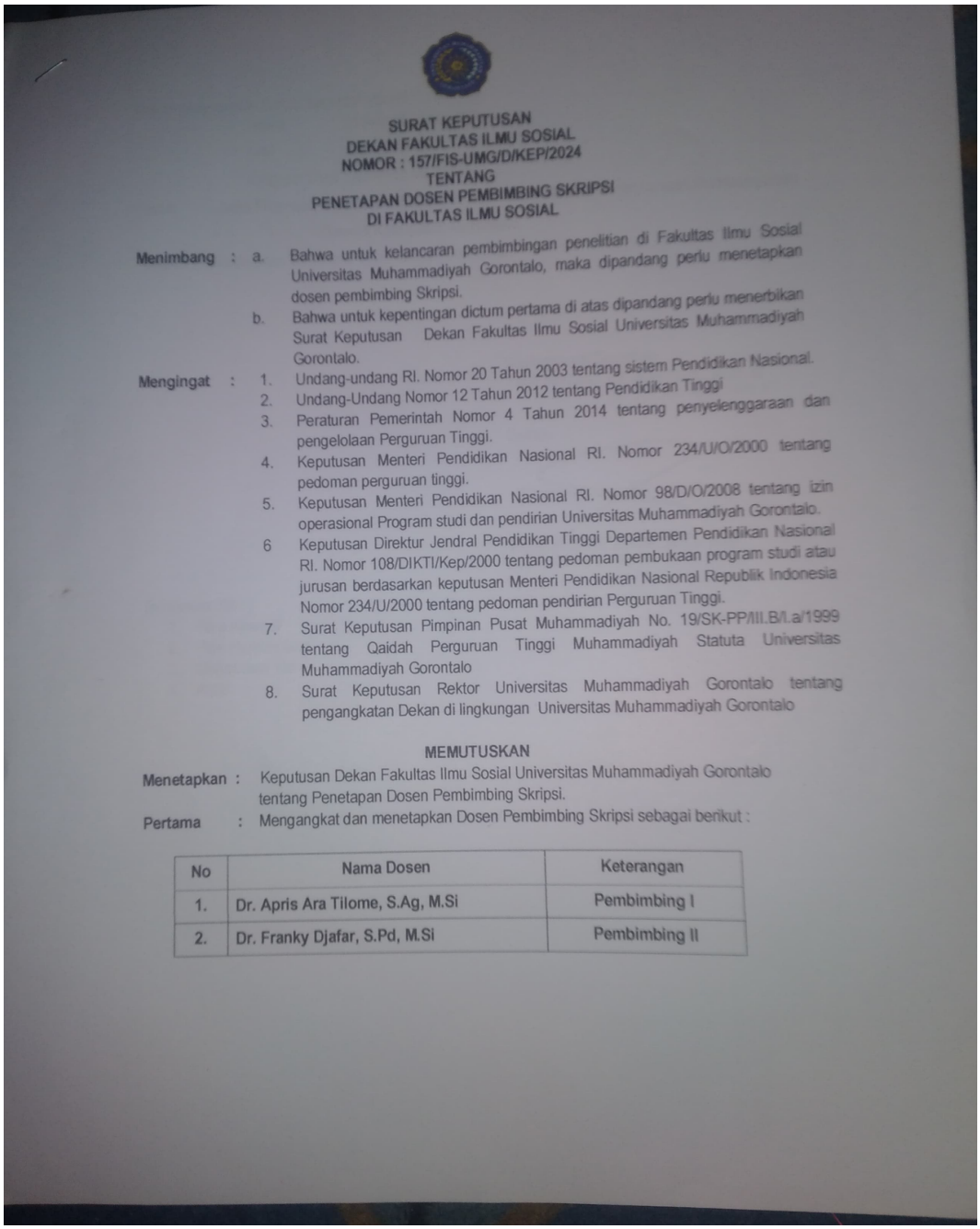
				seperti e-Planning, perlu ada investasi lebih besar dan strategi khusus agar infrastruktur bisa memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.".	
Belum Kuatnya SOP Sebagai Acuan	Apakah SOP terkait E-Planning sudah cukup jelas dan bisa dijadikan panduan dalam bekerja?	MPM	06-05-2025	*SOP yang saat ini tersedia masih umum dan tidak kontekstual, menurut pendapat saya. Misalnya, karena tidak ada penyesuaian SOP berdasarkan struktur kerja di masing-masing bidang, setiap unit kerja tidak memahami alur input e-Planning dengan baik. Akibatnya, ada ketidakkonsistenan dalam cara kerja antar bidang. Saya pikir instansi perlu membuat SOP yang lebih detail.*	SOP yang terlalu umum dan tidak disesuaikan dengan struktur kerja tiap bidang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penggunaan e-Planning. Oleh karena itu, diperlukan SOP yang lebih detail dan kontekstual agar setiap unit kerja memahami alur input dengan jelas dan seragam.
		WR	06-05-2025	*'SOP tersedia, tetapi tidak semua orang mengetahuinya. Sebagian staf baru sama sekali belum diberi pengetahuan tentang prosedur operasi standar (SOP) ini. Akibatnya, dalam praktiknya, kami lebih suka bertanya kepada senior atau belajar sendiri melalui tes dan kesalahan. SOP harus ada dan disosialisasikan sebagai materi pelatihan resmi.*	
		FH	06-05-2025	*'' Menurut saya, prosedur operasi standar (SOP) saat ini kurang jelas. Dokumen yang diberikan tidak memberikan*	

			penjelasan teknis tentang langkah-langkah sistem, hanya garis besar alur kerja. Saya kadang-kadang bingung harus mulai dari mana dan tahapan apa yang harus dilakukan pertama. Jika Standar Operasi Prosedur (SOP) yang lebih rinci akan sangat membantu kami dalam bekerja lebih sistematis dan menghindari input yang salah.
Jika SOP belum tersedia atau belum kuat, bagaimana cara Anda menjalankan tugas terkait e-Planning	DSJ	06-05-2025	*"Biasanya saya mencari tahu dari rekan kerja yang lebih dulu berpengalaman. Kami bekerja sama untuk memahami proses input e-Planning. Jika tidak ada prosedur operasional standar (SOP) yang dapat digunakan sebagai pegangan, saya akan belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan mengingat langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi metode ini pasti memiliki risiko.*
	MPM	06-05-2025	Kalau SOP tidak tersedia, saya mengandalkan catatan pribadi yang saya buat setiap kali menjalankan proses input. Saya dokumentasikan langkah -langkah yang berhasil agar tidak lupa di tahun berikutnya. Ini memang tidak ideal, karena bisa berbeda dengan prosedur resmi. Tapi sejauh ini itu cara paling aman agar tidak salah

				langkah
Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan SDM	“Apa tantangan teknis terbesar yang Anda alami saat mengoperasikan e-Planning?”	GAK	06-05-2025	*”Ketikasistem mengalami error mendadak, terutama saat proses simpan data, kadang-kadang sistem logout sendiri.*
		MPM	06-05-2025	*“Ke depan, saya membutuhkan pelatihan yang lebih praktis dan berkelanjutan. Saat ini, pelatihan hanya diberikan pada saat awal penggunaan sistem, itupun dalam waktu yang singkat. Saya berharap ada pelatihan secara berkala, terutama saat ada pembaruan pada sistem e-Planning. Selain itu, pelatihan harus menyertakan simulasi langsung mulai dari proses login, input data, validasi, sampai penyimpanan akhir. Karena tanpa praktek langsung, kita sulit memahami alur sistem secara utuh. Adanya narasumber atau pendamping yang bisa menjawab pertanyaan teknis secara langsung juga akan sangat membantu.*
		DSJ	06-05-2025	*“Menurut saya, pelatihan yang ideal tidak hanya mencakup aspek teknis pengoperasian e-Planning, tetapi juga menyentuh pada*

pemahaman logika sistem dan bagaimana perencanaan pembangunan dikaitkan dengan sistem tersebut. Kadang pengguna hanya sekadar mengikuti alur, tanpa memahami tujuan atau konsekuensi dari langkah-langkah input yang dilakukan. Jadi, pelatihan berbasis studi kasus, dengan menjelaskan proses bisnis perencanaan, penting dilakukan. Selain itu, dibutuhkan juga pembekalan soft skills seperti manajemen data digital dan literasi teknologi, agar semua staf bisa lebih siap dalam menghadapi sistem yang berbasis digital

Lampiran 5. SK Dosen Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
NOMOR : 157/FIS-UMG/D/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing Skripsi.
b. Bahwa untuk kepentingan dictum pertama di atas dipandang perlu menerbikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/O/2000 tentang pedoman perguruan tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 98/D/O/2008 tentang izin operasional Program studi dan pendirian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
6 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI. Nomor 108/DIKTI/Kep/2000 tentang pedoman pembukaan program studi atau jurusan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/I.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No	Nama Dosen	Keterangan
1.	Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag, M.Si	Pembimbing I
2.	Dr. Franky Djafar, S.Pd, M.Si	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Adelia Mayanggita

NIM : D02421005

Program Studi : Administrasi Publik

Kedua : Judul Proposal **"Penerapan Sistem *E- Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo."**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal : 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

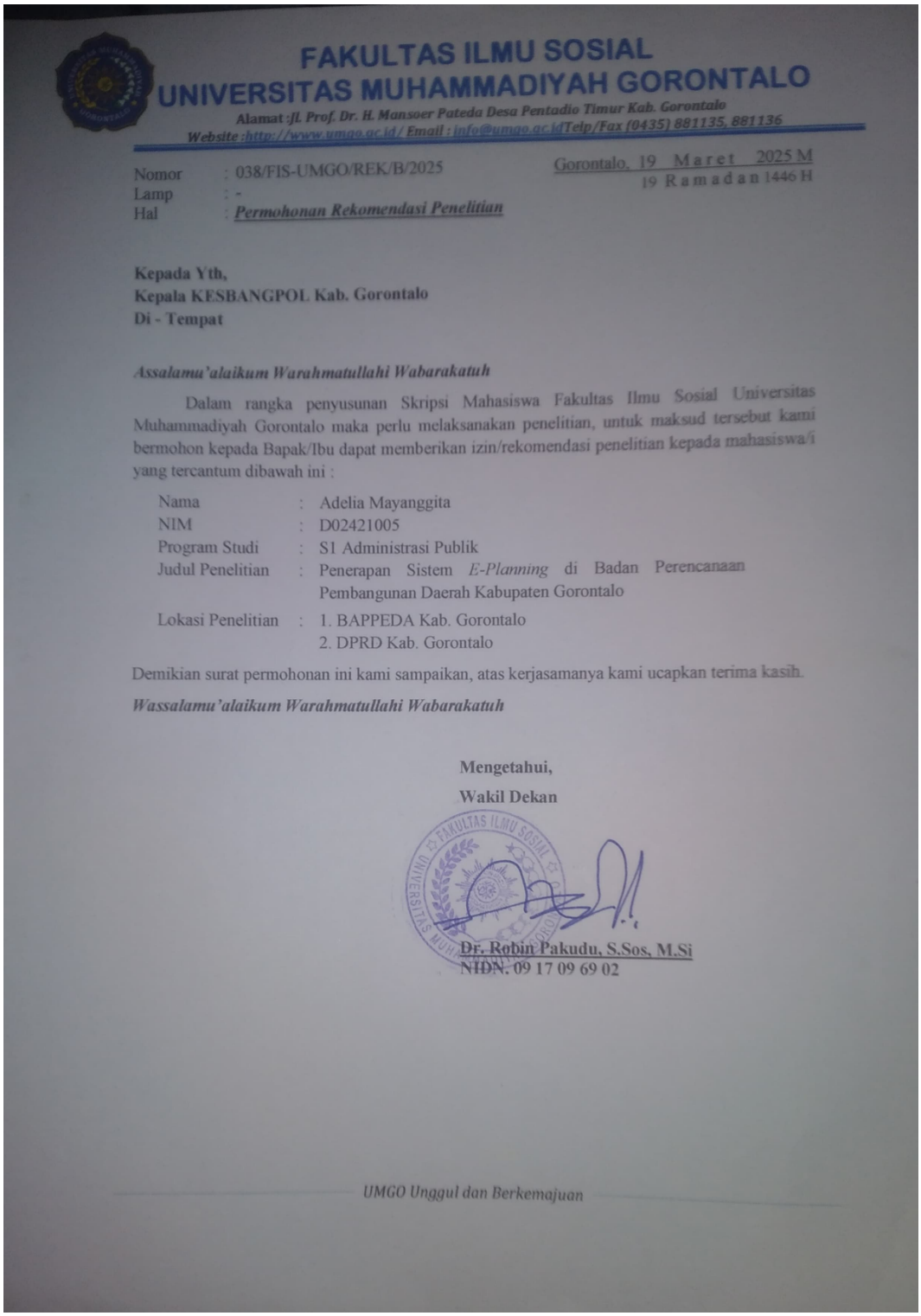
Dekan

Dr. Muh. Firyal Akbar, S.IP., M.Si
NIDN. 09 31 08 89 01

Tembusan Yth :

1. *Para Kaprodi*
2. *Para Pembimbing*
3. *Mahasiswa Ybs*
4. *Arsip*

Lampiran 6.Surat Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Alamat :Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur Kab. Gorontalo
Website :http://www.umgo.ac.id/ Email : info@umgo.ac.idTelp/Fax (0435) 881135, 881136

Nomor : 038/FIS-UMGO/REK/B/2025
Lamp : -
Hal : ***Permohonan Rekomendasi Penelitian***

Gorontalo, 19 Maret 2025 M
19 Ramadan 1446 H

Kepada Yth,
Kepala KESBANGPOL Kab. Gorontalo
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo maka perlu melaksanakan penelitian, untuk maksud tersebut kami bermohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa/i yang tercantum dibawah ini :

Nama	:	Adelia Mayanggita
NIM	:	D02421005
Program Studi	:	S1 Administrasi Publik
Judul Penelitian	:	Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo
Lokasi Penelitian	:	1. BAPPEDA Kab. Gorontalo 2. DPRD Kab. Gorontalo

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Wakil Dekan

Dr. Robin Pakudu, S.Sos, M.Si
NIDN. 09 17 09 69 02

UMGO Unggul dan Berkemajuan

Lampiran 7. Rekomendasi Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
LIMBOTO

REKOMENDASI
Nomor :074 /BKBP/ 341 /IV/2025

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Nomor : 038/FIS-UMGO/REK/B/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	**ADELIA MAYANGGITA**
NIM	:	D02421005
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Desa Monggolito Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo
Maksud	:	Melaksanakan Penelitian Dalam rangka Penyusunan Skripsi
Judul	:	**"Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo"**
Lokasi	:	1. Bappeda Kab. Gorontalo 2. DPRD Kab. Gorontalo
Waktu	:	Tanggal 30 April 2025 s/d 10 Mei 2025

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 30 April 2025

a.n KEPALA BADAN
Analis Kebijakan Ahli Muda

Hasan Dj. Buheli, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19810429 200604 1 007

Tembusan Yth :
1. Bupati Gorontalo
2. Wakil Bupati Gorontalo
3. Kepala Bappeda Kab. Gorontalo
4. Kepala Sekretariat DPRD Kab. Gorontalo
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran 8,Surat Keterangan Telah Meneliti

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. Kolonel Rauf Mo'o No. 10 Kel. KayubulanKec. LimbotoKode Pos 96211

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.000.7/ 213 /Bapelitbangda/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	**Drs. COKRO R. KATILIE, ME**
N I P	:	196903231990101001
Jabatan	:	Kepala Badan
Unit Kerja	:	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	**ADELIA MAYANGGITA**
NIM	:	D02421005
Program Studi	:	Administrasi Publik
Fakultas	:	Ilmu Sosial
Judul Penelitian	:	**"Penerapan Sistem E-Planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo"**

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dari tanggal 30 April 2025 s/d 10 Mei 2025 di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 10 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Drs. COKRO R. KATILIE, ME
yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

Lampiran 9.Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Wawancara dengan Sub Koordinator perencana



Wawancara dengan Staf Koordinator Bidang Perencanaan



Wawancara Staf Kepegawaian



Wawancara dengan Staf Bagian IT



Lembaga Dprd Komisi III